

LAPORAN KINERJA

TRIWULAN II



**DIREKTORAT IKAN AIR PAYAU
KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
DIREKTORAT JENDERAL PERIKANAN BUDI DAYA**

2025

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

KATA PENGANTAR

Puji syukur kepada Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya serta dukungan kerja sama dari semua pihak terkait di lingkup Direktorat Ikan Air Payau, sehingga penyusunan Laporan Kinerja (LKj) Direktorat Ikan Air Payau periode Triwulan II tahun 2025 ini dapat terlaksana dengan baik. LKj Direktorat Ikan Air Payau tahun 2025 ini disusun dalam rangka memenuhi Peraturan Presiden (Perpres) nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), yang merupakan wujud pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas sesuai visi dan misi yang dibebankan kepada Direktorat Ikan Air Payau dalam periode tahun 2025.

Selain itu, laporan ini disusun sebagai sarana pengendalian dan penilaian kinerja dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan pemerintah yang baik dan bersih (*good governance and clean government*), serta sebagai umpan balik dalam perencanaan dan pelaksanaan kegiatan ke depan.

Semoga laporan ini dapat menjadi tolak ukur dan memberikan umpan balik bagi peningkatan kinerja bagi Direktorat Ikan Air Payau, serta menjadi motivasi untuk meningkatkan pembangunan perikanan budi daya yang berkelanjutan

Jakarta, 17 Juli 2025
Direktur Ikan Air Payau



Ditandatangani
Secara Elektronik

Fernando J. Simanjuntak, S.St.Pi., M.Pi.
NIP. 19780523 200212 1 004

IKHTISAR EKSEKUTIF

Laporan Kinerja Direktorat Ikan Air Payau Tahun 2025 merupakan pelaksanaan dari Peraturan Presiden (Perpres) nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Penyusunan laporan kinerja Direktorat Ikan Air Payau merujuk pada Rencana Strategis (Renstra) Perikanan Budi Daya Tahun 2025-2029 serta Perjanjian Kinerja (PK) Direktorat Ikan Air Payau tahun 2025 yang memuat indikator kinerja, target yang akan dicapai, realisasi kinerja, kendala/permasalahan yang dihadapi selama pelaksanaan indikator kinerja, dan rencana aksi sebagai bentuk rekomendasi yang akan dilaksanakan di periode yang akan datang.

Direktorat Ikan Air Payau telah menetapkan peta strategis tahun 2025 dengan 2 (dua) Sasaran Strategis (SS) dan 19 (sembilan belas) kegiatan yang terdiri atas 12 (dua belas) Indikator Kinerja Utama (IKU) dan 7 (tujuh) Indikator Kinerja Manajerial (IKM). Sasaran kegiatan satker Direktorat Ikan Air Payau adalah sebagai berikut:

1. SK-1 : Terkelolanya Sistem Perikanan Budi Daya Ikan Air Payau. Kegiatan ini memiliki 12 (dua belas) IKU, yaitu:
 - a) Potensi Kawasan Budidaya Ikan Air Payau (Lokasi
 - b) Produksi Calon Induk Unggul Ikan Air Payau yang Diproduksi UPT sebanyak 6.411 ekor;
 - c) Produksi Calon Induk Unggul Udang yang Diproduksi UPT sebanyak 191.744 ekor;
 - d) Benih Ikan Air Payau yang Disalurkan ke Masyarakat sebanyak 2.964.669 ekor;
 - e) Benih Udang yang Disalurkan ke Masyarakat sebanyak 40.058.988 ekor;
 - f) Unit Budi Daya Ikan Air Payau yang Dibina Penerapan Sertifikasi Perikanan Budi Daya (CBIB, CPIB, CPPIB, CPOIB, CDOIB) sebanyak 200 unit;
 - g) Sampel Nutrisi Pakan dan Obat Ikan Payau yang diuji sebanyak 122 sampel
 - h) Sampel Penyakit Ikan Air Payau yang Diuji dalam Rangka Pelayanan Laboratorium Kesehatan Ikan dan Lingkungan sebanyak 5.376 sampel;
 - i) Sampel Monitoring Residu Ikan Air Payau Diuji sebanyak 250 sampel;
 - j) Sampel Monitoring Penyakit Ikan Air Payau yang diuji sebanyak 210 sampel;
 - k) Sampel Surveilans Resistensi Antimikroba (AMU/AMR) Ikan Air Payau sebanyak 151 sampel;
 - l) Kebijakan Tata Kelola Bidang Budidaya Ikan Air Payau sebanyak 3 Rekomendasi Kebijakan
2. SK-2: Terwujudnya Layanan Dukungan Manajemen yang Baik Lingkup Direktorat Ikan Air Payau. Kegiatan ini memiliki 7 (tujuh) IKM, yaitu:
 - a) Nilai PM SAKIP Satker Direktorat Ikan Air Payau sebanyak 84;
 - b) Indeks Profesionalitas ASN Satker Direktorat Ikan Air Payau sebanyak 81;
 - c) Persentase Penyelesaian Temuan BPK Lingkup Direktorat Ikan Air Payau sebanyak 100 persen;

- d) Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja Satker Direktorat Ikan Air Payau sebanyak 85 persen;
- e) Persentase Layanan Perkantoran Direktorat Ikan Air Payau sebanyak 80 persen;
- f) Nilai Pengawasan Kearsipan Internal Satker Direktorat Ikan Air PayauL Payau sebanyak 70.
- g) Persentase Penyelesaian SOP Satker Direktorat Ikan Air Payau sebanyak 65.

Berdasarkan 19 (dua puluh satu) indikator kinerja sebanyak 10 (sepuluh) indikator kinerja telah dilakukan penghitungan capaian realisasi kegiatan dengan target yang telah ditentukan pada tahun 2025, adapun indikator kinerja tersebut yaitu:

1. Produksi Calon Induk unggul Ikan Air Payau yang di Produksi UPT pengukuran indikator kinerja ini dilakukan secara triwulanan dengan target Triwulan II yaitu 1565 ekor dari target tahun 2025 sebanyak 6411, dengan realisasi yang tercapai adalah 2017 ekor, sehingga capaian untuk indikator ini sudah mencapai target yang sudah ditetapkan pada Triwulan II. Tindak lanjut dari capaian ini yaitu perlunya terus mendorong produksi calon induk ikan air payau untuk disalurkan ke masyarakat sehingga target yang telah ditetapkan dapat tercapai.
2. Produksi Calon Induk unggul Udang untuk bantuan dan Operasional yang dilaksanakan oleh UPT Pelaksana pengukuran indikator kinerja ini dilakukan secara triwulanan dengan target Triwulan II yaitu 18.991 ekor dari target tahun 2025 sebanyak 191.744, dengan realisasi yang tercapai adalah 29349 ekor, sehingga capaian untuk indikator ini sudah mencapai target yang sudah ditetapkan pada Triwulan II. Tindak lanjut dari capaian ini yaitu perlunya terus mendorong produksi calon induk Udang untuk disalurkan ke masyarakat sehingga target yang telah ditetapkan dapat tercapai.
3. Benih Ikan Air Payau yang Disalurkan ke Masyarakat, pengukuran indikator kinerja ini dilakukan secara triwulanan dengan target Triwulan II yaitu 556.000 ekor dari target tahun 2025 sebanyak 2.964.669, dengan realisasi yang tercapai adalah 671.000 ekor, sehingga capaian untuk indikator ini sudah mencapai target yang sudah ditetapkan pada Triwulan II. Tindak lanjut dari capaian ini yaitu perlunya terus mendorong produksi benih ikan air payau untuk disalurkan ke masyarakat sehingga target yang telah ditetapkan dapat tercapai.
4. Benih Udang yang Disalurkan ke Masyarakat, pengukuran indikator kinerja ini dilakukan secara triwulanan dengan target Triwulan II yaitu 11.000.0000 ekor dari target tahun 2025 sebanyak 40.058.988, dengan realisasi yang tercapai adalah 11.911.350 ekor, sehingga capaian untuk indikator ini sudah mencapai target yang sudah ditetapkan pada Triwulan II Tindak lanjut dari capaian ini yaitu perlunya terus mendorong produksi benih udang untuk disalurkan ke masyarakat sehingga target yang telah ditetapkan dapat tercapai.

5. Sampel Nutrisi Pakan dan Obat Ikan Yang diuji indikator kinerja ini dilakukan secara triwulanan dengan target Triwulan II yaitu 30 sampel dari target tahun 2025 sebanyak 122 sampel, dengan realisasi yang tercapai adalah 159 sampel, sehingga capaian untuk indikator ini sudah mencapai target yang sudah ditetapkan pada Triwulan II. Tindak lanjut dari capaian ini yaitu perlunya berkoordinasi dengan UPT yang memproduksi pakan ikan air payau sehingga target yang telah ditetapkan dapat tercapai.
6. Sampel Penyakit Ikan Air Payau yang Diuji dalam Rangka Pelayanan Laboratorium Kesehatan Ikan dan Lingkungan, pengukuran indikator kinerja ini dilakukan secara triwulanan dengan target Triwulan II yaitu 2.688 sampel dari target tahun 2025 sebanyak 5.376 sampel, dengan realisasi yang tercapai adalah 8.816 sampel, sehingga capaian untuk indikator ini sudah mencapai target yang sudah ditetapkan pada Triwulan II. Tindak lanjut dari capaian ini yaitu perlunya berkoordinasi dengan UPT yang memberikan pelayanan laboratorium kesehatan ikan dan lingkungan.
7. Sampel Surveilans Resistensi Antimikroba (AMU/AMR) Ikan Air Payau dalam Rangka Pelayanan Laboratorium Kesehatan Ikan dan Lingkungan pengukuran indikator kinerja ini dilakukan secara triwulanan dengan target Triwulan II yaitu 77 sampel dari target tahun 2025 sebanyak 151 sampel, dengan realisasi yang tercapai adalah 119 sampel, sehingga capaian untuk indikator ini sudah mencapai target yang sudah ditetapkan pada Triwulan II. Tindak lanjut dari capaian ini yaitu perlunya berkoordinasi dengan UPT yang memberikan pelayanan laboratorium kesehatan ikan dan lingkungan.
8. Indeks Profesionalisme ASN Lingkup Direktorat Ikan Air Payau, pengukuran indikator kinerja ini dilakukan secara triwulanan dengan target Triwulan II yaitu 74 persen dari target tahun 2025 sebanyak 81 persen, dengan realisasi yang tercapai adalah 78,22 persen, sehingga capaian untuk indikator ini sudah mencapai target yang sudah ditetapkan pada Triwulan I. Tindak lanjut dari capaian ini yaitu tetap meningkatkan persentase Indeks Profesionalisme ASN lingkup Direktorat Ikan Air Payau sehingga persentase capaian dapat terus meningkat.
9. Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja Satker Direktorat Ikan Air Payau, pengukuran indikator kinerja ini dilakukan secara triwulanan dengan target Triwulan II yaitu 85 persen dari target tahun 2025 sebanyak 85 persen, dengan realisasi yang tercapai adalah 100 persen, sehingga capaian untuk indikator ini sudah mencapai target yang sudah ditetapkan pada Triwulan II
10. Persentase Layanan Perkantoran Direktorat Ikan Air Payau, pengukuran indikator kinerja ini dilakukan secara triwulanan dengan target Triwulan II yaitu 80 persen dari target tahun 2025 sebanyak 80 persen, dengan realisasi yang tercapai adalah 98,26 persen, sehingga capaian untuk indikator ini sudah mencapai target yang sudah ditetapkan pada Triwulan II Tindak lanjut dari capaian ini yaitu tetap meningkatkan persentase pelayanan perkantoran lingkup Direktorat Ikan Air Payau sehingga persentase capaian dapat terus meningkat.

Peningkatan kinerja terhadap pencapaian beberapa IKU yang masih belum mencapai target maka menjadi perhatian bagi satker Direktora Ikan Air Payau pada beberapa kegiatan pendukung IKU dimaksud serta melakukan penyempurnaan terhadap kebijakan yang ada untuk lebih mengoptimalkan pencapaian sasaran strategis. Dengan demikian, diharapkan senantiasa melakukan perbaikan kinerja dalam rangka mendorong tercapainya indikator kinerja Direktorat Ikan Air Payau yang efektif dan efisien.

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
IKHTISAR EKSEKUTIF	ii
DAFTAR ISI	vi
DAFTAR TABEL	viii
DAFTAR GAMBAR	ix
BAB I. PENDAHULUAN	9
1.1 Latar Belakang.....	9
1.2 Maksud dan Tujuan	10
1.3 Tujuan dan Fungsi	11
1.4 Sumber Daya Manusia	12
1.5 Potensi dan Permasalahan Pembangunan Perikanan Budi Daya	13
1.5.1 Potensi	14
1.5.2 Permasalahan	15
1.6 Sistematika Penyajian Laporan Kinerja	17
BAB II. PERENCANAAN DAN PENETAPAN KINERJA.....	18
2.1 Rencana Strategis Tahun 2020 – 2024	19
2.2 Sasaran Strategis	19
2.3 Penetapan Kinerja Tahun 2024	20
2.4 Pengukuran Kinerja Tahun 2024	25
BAB III. AKUNTABILITAS KINERJA	26
3.1 Capaian Kinerja Organisasi	26
3.2 Analisis Capaian Kinerja	28
3.2.1 SK-1 : Terkelolanya Sistem Perikanan Budi Daya Ikan Air Payau	28
IKU 1. Potensi Kawasan Budidaya Ikan Air Payau (Lokasi).....	28
IKU 2. Produksi Calon Induk Unggul Ikan Air Payau yang Diproduksi UPT	31
IKU 3. Produksi Induk Unggul Udang untuk bantuan dan operasional UPT.....	33
IKU 4. Benih Ikan Air Payau yang Disalurkan ke Masyarakat	34
IKU 5. Benih Udang yang Disalurkan ke Masyarakat	36
IKU 6. Unit Budi Daya Ikan Air Payau yang Dibina Penerapan Sertifikasi Perikanan Budi Daya (CBIB, CPIB, CPPIB, CPOIB, CDOIB).....	38
IKU 7. Sampel Nutrisi Pakan dan Obat Ikan Air Payau yang Diuji	40
IKU 8. Sampel Penyakit Ikan Air Payau yang Diuji dalam rangka Pelayanan Laboratorium Kesehatan Ikan dan Lingkungan (sampel).....	41
IKU 9. Sampel Monitoring Residu Ikan Air Payau yang diuji	43
IKU 10. Sampel Monitoring Penyakit Ikan Air Payau yang diuji.....	44
IKU 11. Sampel Surveilans Resistensi Antimikroba Ikan Air Payau (AMR) yang diuji	45

IKU 12. Kebijakan Tata Kelola Bidang Budi Daya Ikan Air Payau	47
3.2.2 SK-2: Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik di Lingkungan Direktorat Ikan Air Payau	
IKU 13. Nilai PM SAKIP Satker Direktorat Ikan Air Payau	49
IKU 14. Indeks Profesionalitas ASN Satker Direktorat Ikan Air Payau	50
IKU 15. Persentase Penyelesaian Temuan BPK Lingkup Direktorat Ikan Air Payau	53
IKU 16. Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja Satker Direktorat Ikan Air Payau	54
IKU 17. Persentase Layanan Perkantoran Direktorat Ikan Air Payau	56
IKU 18. Nilai Pengawasan Kerasipan Internal Satker Direktorat Ikan Air Payau	57
IKU 19. Persentase Penyelesaian SOP Satker Direktorat Ikan Air Payau	.58
BAB IV. Penutup	60

DAFTAR TABEL

Tabel 1. Tingkat Pendidikan Pegawai Direktorat Ikan Air Payau **Error! Bookmark not defined.**

Tabel 2. Capaian Sasaran Strategis Direktorat Ikan Air Payau Selama Periode Triwulan II Tahun 2025.....	26
Tabel 3. Target Potensi Kawasan Budidaya Ikan Air Payau 2025.....	28
Tabel 4. Capaian IKU Potensi Kawasan Budidaya Ikan Air Payau	31
Tabel 5. Capaian IKU Produksi Calon Induk Unggul Ikan Air Payau yang Diproduksi UPT	332
Tabel 6. Capaian IKU Produksi Calon Induk Unggul Udang yang Diproduksi UPT .	33
Tabel 7. Rekapitulasi Bantuan Calon Induk Udang yang disalurkan ke Masyarakat.	34
Tabel 8. Capaian IKU Benih Ikan Air Payau yang Disalurkan ke Masyarakat.....	35
Tabel 9. Rekapitulasi Bantuan Benih Ikan Air Payau yang disalurkan ke Masya...	36
Tabel 10. Capaian IKU Benih Udang yang Disalurkan ke Masyarakat.....	37
Tabel 11. Rekapitulasi Bantuan Benih Udang yang disalurkan Masyarakat.....	37
Tabel 12. Target per Ruang Lingkup Pembinaan Tahun 2025.....	39
Tabel 13. Capaian IKU Unit Budi Daya Ikan Air Payau yang Dibina Penerapan Sertifikasi Perikanan Budi Daya (CBIB, CPIB, CPPIB, CPOIB, CDOIB) ...	39
Tabel 14. Target dan Realisasi Capaian Sampel Nutrisi dan Mutu Pakan Ikan Payau Periode Triwulan II 2025.....	40
Tabel 15. Capaian IKU Sampel Nutrisi Pakan dan Mutu Pakan Ikan.....	40
Tabel 16. Target Sampel Per Ruang Lingkup Pengujian Tahun 2025.....	41
Tabel 17. Target dan Realisasi Sampel Penyakit Ikan Air Payau yang diuji dalam rangka Pelayanan Laboratorium Kesehatan Ikan dan Lingkungan.....	42
Tabel 18. Capaian IKU Sampel Penyakit Ikan Air Payau yang Diuji dalam Rangka Pelayanan Laboratorium Kesehatan Ikan dan Lingkungan	43
Tabel 19. Capaian IKU Sampel Monitoring Residu Ikan Air Payau yang diuji.....	44
Tabel 20. Capaian IKU Sampel Monitoring Penyakit Ikan Air Payau yang Diuji.....	45
Tabel 21. Capaian Indikator Kinerja Sampel Surveilans Resistensi Antimikroba (AMU/AMR) Ikan Air Payau Triwulan II Tahun 2025.....	46
Tabel 22. Capaian IKU Sampel Surveilans Resistensi Antimikroba (AMU/AMR)	47
Tabel 23. Capaian IKU Kebijakan Tata Kelola Bidang Budi Daya Ikan Air Payau	48
Tabel 24. Capaian IKU Nilai PM SAKIP Satker Direktorat Ikan Air Payau	49
Tabel 25. Capaian IKU Indeks Profesionalitas ASN Satker Direktorat Ikan Air Payu	52
Tabel 26. Capaian IKU Persentase Penyelesaian Temuan BPK Lingkup Dit IAP....	53
Tabel 27. Capaian IKU Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja Satker Direktorat Ikan Air Payau	54
Tabel 28. Rekapitulasi Kehadiran Pegawai Direktorat Ikan Air Payau Triwulan II ..	54
Tabel 29. Rekapitulasi Persuratan pada Direktorat Ikan Air Payau Triwulan II.....	56
Tabel 30. Capaian IKU Persentase Layanan Perkantoran Direktorat Ikan Air payu	57
Tabel 31. Capaian IKU Nilai Pengawasan Kearsipan Internal Satker Direktorat	58
Tabel 32. Capaian IKU Nilai Pengawasan kearsipan Internal Satker Dit IAP.....	59

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Struktur Organisasi Direktorat Ikan Air Payau	12
Gambar 2. Keragaan Jabatan di Direktorat Ikan Air Payau.....	13
Gambar 3. Luas Perikanan Budi Daya Eksisting Tahun 2020.....	14
Gambar 4. Perjanjian Kinerja Dit. Ikan Air Payau Tahun 2025.. Error! Bookmark not defined.	
Gambar 5. Hasil pengukuran kinerja sampai Triwulan II tahun 2025	25
Gambar 6. Progres Kegiatan Integrated Shrim Farming	30
Gambar 7. Matrik Perhitungan Indeks Profesionalitas ASN.....	51

BAB I. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Indonesia mempunyai potensi sumber daya alam kelautan dan perikanan yang sangat besar. Peran penting kelautan dan perikanan tertuang dalam Peraturan Presiden Nomor 109 tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2025 dan Peraturan Presiden nomor 12 tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) tahun 2025 – 2029. RPJMN merupakan penjabaran visi, misi dan program pasangan Presiden dan Wakil Presiden yang disusun berdasarkan RPJP Nasional. Sehubungan dengan hal tersebut Kementerian Kelautan dan Perikanan telah menerbitkan Rencana Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan Tahun 2025 yang tertuang dalam Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 91 Tahun 2024.

Rencana kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) memuat arah kebijakan, sasaran strategis, program dan kegiatan serta dukungan terhadap program prioritas nasional yang selaras dengan 8 (delapan) misi Asta Cita yang terdiri atas : (1) memperkuat ideologi Pancasila, demokrasi, dan Hak Asasi Manusia (HAM); (2) memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian Bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi Syariah, ekonomi digital, ekonomi hijau, dan ekonomi biru; (3) melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi; (4) memperkuat pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda, dan penyandang disabilitas; (5) melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis Sumber Daya Alam (SDA) untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri; (6) Membangun dari Desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi, dan pemberantasan kemiskinan; (7) memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan; (8) memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan

lingkungan, alam dan budaya, serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur

Arah dan kebijakan KKP Tahun 2025 dilaksanakan dengan prinsip ekonomi biru sebagaimana tuntutan pembangunan global, terdiri atas: (1) memperluas kawasan konservasi laut; (2) penangkapan ikan terukur berbasis kuota penangkapan ikan; (3) Pengembangan perikanan budi daya di laut, pesisir, dan darat yang berkelanjutan; (4) pengawasan dan pengendalian wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil; dan (5) pembersihan sampah plastik di laut melalui gerakan partisipasi nelayan atau bulan cinta laut.

Dengan ditetapkannya arah dan kebijakan serta kegiatan pembangunan perikanan budi daya, maka sasaran strategis pembangunan perikanan budi daya berdasarkan tujuan yang akan dicapai telah dijabarkan dalam 2 (dua) perspektif dengan masing-masing indikator kinerja sebagaimana tercantum pada Perjanjian Kinerja Direktorat Jenderal Perikanan Budi daya KKP untuk mengatasi tantangan global dan permasalahan yang menuntut perubahan paradigma dan desain percepatan pembangunan perikanan.

Berdasarkan Instruksi Presiden (Inpres) nomor 17 tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Presiden (Perpres) nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), dan Permen PAN dan RB RI nomor 53 tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, menyatakan bahwa setiap kementerian berkewajiban menyusun Laporan Kinerja (LKj) sebagai bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan yang dilaksanakan berdasarkan Rencana Strategis (Renstra) maupun Rencana Kerja Tahunan (RKT) yang dibuat sebelumnya. LKj juga merupakan sarana untuk menilai dan mengevaluasi pencapaian kinerja berdasarkan indikator sasaran yang telah ditetapkan sebelumnya sehingga prinsip pemerintahan yang bersih dan bertanggung jawab (*good governance*) dapat diwujudkan.

1.2. Maksud dan Tujuan

Laporan Kinerja (LKj) Direktorat Ikan Air Payau periode Triwulan II tahun 2025 merupakan salah satu bentuk media informasi atas pelaksanaan program atau kegiatan dan pengelolaan anggaran Direktorat Ikan Air Payau. Tujuan penyusunan

LKj Direktorat Ikan Air Payau Triwulan II tahun 2025 adalah untuk menilai dan mengevaluasi pencapaian kinerja dan sasaran Direktorat Ikan Air Payau selama tahun periode Triwulan I tahun 2025. Berdasarkan hasil evaluasi yang dilakukan kemudian dirumuskan suatu kesimpulan yang dapat menjadi salah satu bahan masukan dan referensi dalam menetapkan kebijakan pembangunan perikanan budi daya ke depan sehingga terwujudnya pembangunan yang berkelanjutan.

1.3. Tujuan dan Fungsi

Berdasarkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan RI Nomor 2 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan, Direktorat Ikan Air Payau mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta evaluasi dan pelaporan di bidang pengelolaan perikanan budi daya pada komoditas ikan air payau. Dalam melaksanakan tugas tersebut Direktorat Ikan Air Payau menyelenggarakan fungsinya sebagai berikut:

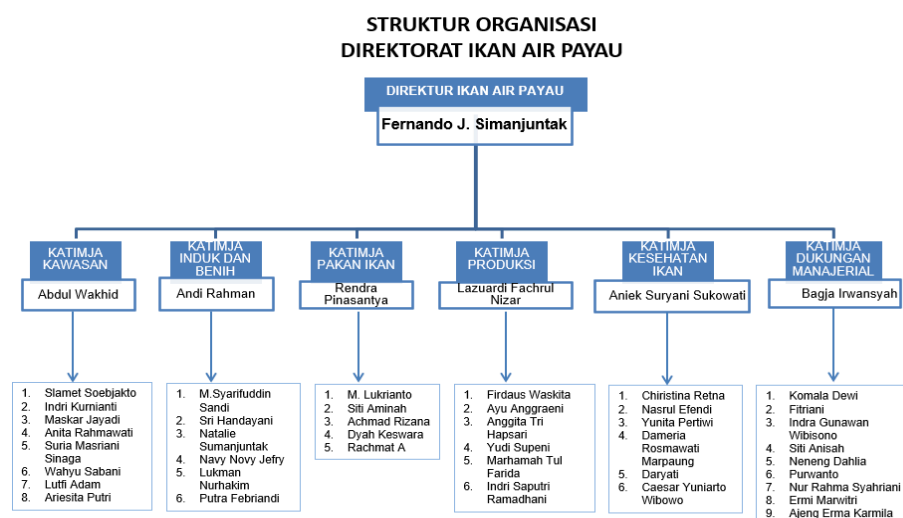
- (i) Perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang standardisasi perikanan budi daya, pemanfaatan dan pengelolaan kawasan pembudi dayaan ikan, pengelolaan prasarana dan sarana pembudi dayaan ikan, pemanfaatan dan pelestarian plasma nutfah, pengelolaan kesehatan ikan budi daya dan lingkungan pembudi dayaan ikan, dan pengelolaan usaha perikanan budi daya, serta perlindungan dan pemberdayaan pembudi daya ikan pada komoditas ikan air payau;
- (ii) Penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria di bidang standardisasi perikanan budi daya, pemanfaatan dan pengelolaan kawasan pembudi dayaan ikan, pengelolaan prasarana dan sarana pembudi dayaan ikan, pemanfaatan dan pelestarian plasma nutfah, pengelolaan kesehatan ikan budi daya dan lingkungan pembudi dayaan ikan, dan pengelolaan usaha perikanan budi daya, serta perlindungan dan pemberdayaan pembudi daya ikan pada komoditas ikan air payau;
- (iii) Pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang standardisasi perikanan budi daya, pemanfaatan dan pengelolaan kawasan pembudi dayaan ikan, pengelolaan prasarana dan sarana pembudi dayaan ikan,

pemanfaatan dan pelestarian plasma nutfah, pengelolaan kesehatan ikan budi daya dan lingkungan pembudi dayaan ikan, dan pengelolaan usaha perikanan budi daya, serta perlindungan dan pemberdayaan pembudi daya ikan pada komoditas ikan air payau;

- (iv) Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang standardisasi perikanan budi daya, pemanfaatan dan pengelolaan kawasan pembudi dayaan ikan, pengelolaan prasarana dan sarana pembudi dayaan ikan, pemanfaatan dan pelestarian plasma nutfah, pengelolaan kesehatan ikan budi daya dan lingkungan pembudi dayaan ikan, dan pengelolaan usaha perikanan budi daya, serta perlindungan dan pemberdayaan pembudi daya ikan pada komoditas ikan air payau;
- (v) Pelaksanaan urusan administrasi Direktorat Ikan Air Payau

1.4. Sumber Daya Manusia

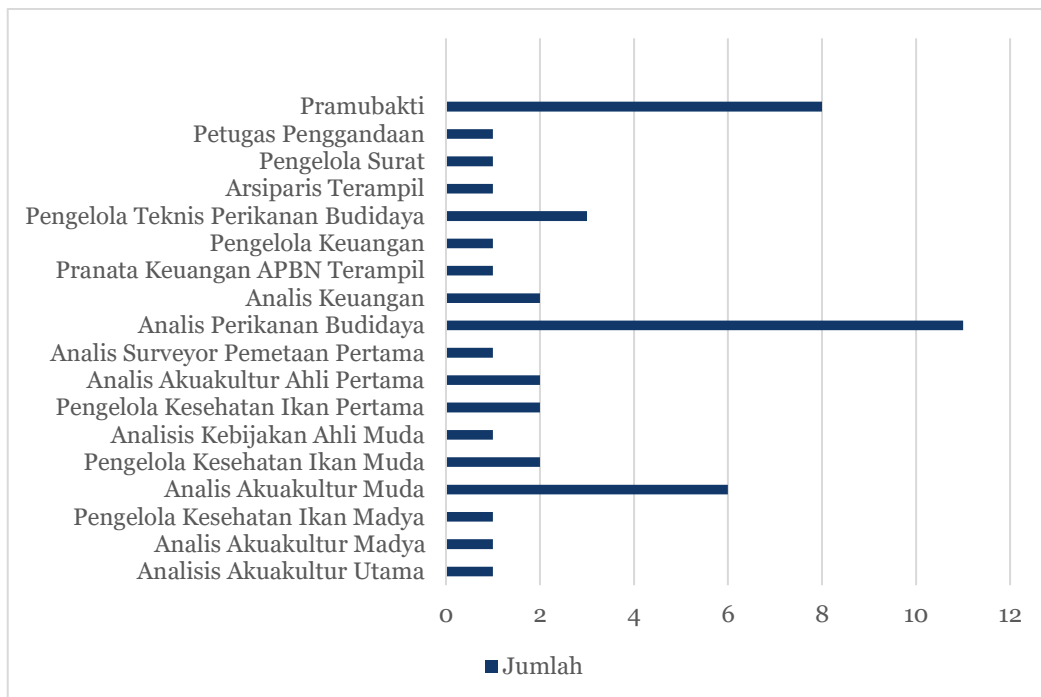
Sesuai dengan peraturan Menteri PANRB Nomor 7 Tahun 2022 dan peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan RI Nomor 2 Tahun 2025 terjadi perubahan mekanisme kerja baru di Direktorat Jenderal Perikanan Budi Daya, salah satunya adalah dengan melakukan perubahan organisasi Direktorat Produksi dan Usaha Budi daya menjadi Direktorat Ikan Air Payau. Sehingga susunan struktur organisasi Direktorat Ikan Air Payau di tahun 2025 terdiri atas Direktur Ikan Air Payau dan 6 (enam) Tim kerja. Susunan struktur organisasi dapat dilihat pada gambar dibawah:



Update per 19 April 2025

Gambar 1. Struktur Organisasi Direktorat Ikan Air Payau

Jumlah pegawai Direktorat Ikan Air Payau sampai dengan Juni tahun 2025 berjumlah 47 orang yang terdiri dari pegawai PNS sejumlah 35 orang, PPPK 4 orang dan tenaga kontrak sejumlah 8 orang. Data pegawai jika dilihat berdasarkan jenis jabatan di Direktorat Ikan Air Payau masih terbagi menjadi dua yaitu jabatan fungsional umum dan jabatan fungsional tertentu. Keragaan pejabat fungsionalat umum dan tertentu Direktorat Ikan Air Payau dapat dilihat pada Gambar 2.



Gambar 2. Keragaan Jabatan di Direktorat Ikan Air Payau

Sedangkan Berdasarkan tingkat pendidikan, komposisi SDM Direktorat Ikan Air Payau adalah sebagai berikut: (i) S2 sejumlah 13 orang (27,66%); (ii) S1 sejumlah 25 orang (53,11%); (iii) D3 sejumlah 2 orang (4,25 %); dan (iv) SLTA/D1/D2 sejumlah 6 orang (12,76%).

Tabel 1. Tingkat Pendidikan Pegawai Direktorat Ikan Air Payau

No.	Tingkat Pendidikan	Jumlah Pegawai (orang)	%
1.	Magister (S2)	13	27,66
2.	Sarjana (S1/D4)	25	53,19
3.	Diploma (D3)	2	4,25
4.	SLTA/ DI /D2	6	12,76
5.	SMP	1	2,12
Jumlah		47	100

1.5. Potensi dan Permasalahan Pembangunan Perikanan Budi Daya

1.5.1. Potensi

Berdasarkan jenis tipologi ekosistem maka luas potensi perikanan budi daya dapat diklasifikasikan menjadi tiga yaitu perikanan budi daya laut, perikanan budi daya air payau, dan perikanan budi daya air tawar. Luas total potensi lahan perikanan budi daya di Indonesia mencapai 17,92 juta hektar yang terdiri dari 12,12 juta hektar potensi budi daya laut; 2,96 juta hektar lahan perikanan budi daya air payau; dan 2,84 juta hektar potensi budi daya air tawar.

Pemanfaatannya hingga saat ini masing-masing baru 10,16 persen untuk budi daya air tawar, 22,92 persen pada budi daya air payau dan 0,84 persen untuk budi daya laut. Tingkat pemanfaatan ini masih rendah terutama untuk budi daya laut sehingga diperlukan upaya pemanfaatan agar produksi perikanan budi daya dapat terus ditingkatkan. Peningkatan produksi perikanan budi daya harus disertai dengan peningkatan serapan pasar baik ekspor maupun konsumsi dalam negeri.

Pemanfaatan lahan perikanan budi daya masih sangat kecil dengan rata rata sebesar 11,31 % dengan rincian berikut: (i) 102.254 hektar (0,84%) untuk perikanan budi daya air laut; (ii) 679.448 hektar (22,92%) untuk perikanan budi daya air payau; (iii) 287.521 hektar (10,16%) untuk perikanan budi daya air tawar (Satudata KKP 2022).

No.	Jenis Budidaya <i>Type of Aquaculture</i>	Potensi <i>Potency</i> ¹⁾	Pemanfaatan <i>Usage</i> ²⁾	Peluang Pengembangan <i>Developing Opportunity</i>	Persentase Pemanfaatan Lahan Budidaya <i>Percentage of Usage Aquaculture Area</i>
1	Laut - <i>Marine culture</i>	12.123.383	102.254	12.021.129	0,84
2	Payau - <i>Brackishwater culture</i>	2.964.331	679.448	2.284.883	22,92
3	Tawar - <i>Freshwater culture</i>	2.830.540	287.521	2.543.019	10,16

Keterangan -Note:

¹⁾: Data berdasarkan buku saku statistik perikanan budidaya tahun 2015;

²⁾: Data berdasarkan Validasi Nasional Satu Data Kelautan dan Perikanan 2020

Gambar 3. Luas Perikanan Budi Daya Eksisting Tahun 2020
(Sumber: Jurnal Kelautan dan Perikanan dalam angka tahun 2022, ISSN 2829-7660. Volume 1 Tahun 2022)

Ditinjau dari aspek ekonomi, dan sosial perikanan budi daya merupakan salah satu subsektor yang mempunyai potensi dan peran strategis sebagai alternatif untuk peningkatan perekonomian nasional, kesejahteraan sosial dan ketahanan pangan nasional. Potensi produksi perikanan budi daya di Indonesia diestimasi mencapai 100

juta ton/tahun dengan nilai produksi mencapai 251 miliar US Dolar (Dahuri 2018). Pengembangan perikanan budi daya diestimasi akan menciptakan lapangan pekerjaan sebesar 15 juta orang pada tahun 2030, apabila kebijakan peningkatan produksi yang berorientasi ekspor dan domestik diimplementasikan secara tepat dan berkelanjutan di Indonesia. Dalam kerangka pembangunan berkelanjutan, sektor perikanan budi daya mempunyai peran yang sangat penting untuk mewujudkan tujuan pembangunan berkelanjutan yang telah ditetapkan dalam *Sustainable Development Goals* (SDGs). *Food Agriculture Organization* (FAO), menyebutkan bahwa perikanan budi daya mempunyai relevansi terhadap pencapaian SDGs terutama dalam mewujudkan ketahanan pangan nasional (*goal 1*), motor penggerak perekonomian untuk meningkatkan kesejahteraan pembudi daya dan penciptaan lapangan kerja (*goal 4*), menjamin ketersediaan suplai ikan melalui peningkatan produksi ikan yang ramah lingkungan dan berkelanjutan (*goal 12*), dan pengelolaan sumber daya laut yang berkelanjutan (*goal 14*).

1.5.2. Permasalahan

Perikanan budi daya merupakan salah satu sektor alternatif yang diharapkan menjadi sumber devisa negara dan tidak hanya memainkan peran penting dalam meningkatkan pendapatan masyarakat, penyerapan tenaga kerja, penyediaan gizi, dan ketahanan pangan nasional. Perikanan budi daya menjadi pilihan logis yang sangat mungkin dikembangkan di sektor kelautan dan perikanan setelah terjadinya stagnasi produksi perikanan tangkap dalam beberapa tahun terakhir (FAO 2007). Potensi perikanan budi daya yang dimiliki Indonesia sangat besar karena tidak hanya didasarkan pada aspek dua dimensi dari ruang namun secara lebih luas dapat dilihat dari tiga dimensi ruang termasuk kedalaman air. Namun pembangunan sektor perikanan budi daya di Indonesia belum dilakukan secara optimal dan berkelanjutan selama ini.

Permasalahan dan tantangan dalam mengoptimalkan pembangunan perikanan budi daya yang berkelanjutan sangat kompleks dimana dalam hal ini dibagi menjadi permasalahan umum, permasalahan internal, dan permasalahan eksternal.

Permasalahan umum yang dihadapi Direktorat Ikan Air Payau dalam peningkatan produksi perikanan budi daya adalah 1) ketersediaan benih di sentra budi daya yang memenuhi kualitas, kuantitas, dan kontinuitas, 2) disparitas antara lokasi sentra produksi yang potensial dikembangkan (seperti daerah terpencil, wilayah timur,

dan wilayah perbatasan) dengan sentra sarana dan prasarana seperti pakan ikan, peralatan dan mesin penunjang budi daya, 3) musibah banjir dan bencana alam di sentra budi daya yang menyebabkan kegagalan panen dan rusaknya prasarana budi daya, 4) munculnya penyakit baru dan serangan penyakit pada komoditas utama budi daya sehingga meningkatkan biaya produksi atau kegagalan panen, 5) kurangnya kemampuan beradaptasi pelaku usaha terhadap perubahan dalam usaha budi dayanya (perubahan iklim, perkembangan teknologi, peningkatan persyaratan pasar dan persaingan usaha)

Permasalahan internal yang dihadapi oleh Direktorat Ikan Air Payau dalam pembangunan perikanan budi daya berkelanjutan adalah 1) keterbatasan anggaran dibandingkan dengan tugas dan fungsi yang diberikan, 2) sarana dan prasarana pendukung pelaksanaan tugas, 3) keterbatasan kesempatan untuk melakukan sinergitas dalam rangka mendukung peningkatan produksi dan usaha budi daya.

Sedangkan permasalahan eksternal dalam pembangunan perikanan budi daya yang berkelanjutan yaitu 1) kurangnya sinergitas dengan pemangku kepentingan lain seperti asosiasi dan pemerintah daerah, 2) kompleksnya perizinan berusaha bagi pembudi daya di Indonesia, 3) lemahnya stabilitas usaha budi daya bagi skala mikro dan kecil yang menyebabkan kurangnya kepercayaan lembaga pembiayaan (tidak *bankable*), 4) meningkatnya persyaratan produk perikanan budi daya di pasar nasional dan internasional, 5) keterlibatan berbagai pihak dalam penguatan kelembagaan usaha budi daya belum optimal.

Tantangan dalam pengembangan perikanan budi daya berkelanjutan di masa sekarang yaitu: (i) penurunan daya beli konsumen sehingga usaha budi daya harus efisien dan menghasilkan ikan dengan harga terjangkau, (ii) isu kerusakan lingkungan akibat kegiatan budi daya sehingga pelaksanaan kegiatan budi daya harus mempertimbangkan kelestarian lingkungan; (iii) perkembangan teknologi dan perubahan demografi penduduk sehingga perlu penyesuaian dalam kegiatan usaha budi daya dan pemasaran hasilnya. (iv) persaingan ekspor akibat peningkatan produksi budi daya di beberapa negara lain berkembang lebih pesat dengan harga yang bersaing; (v) meningkatnya dampak perubahan iklim terhadap kegiatan budi daya.

1.6. Sistematika Penyajian Laporan Kinerja

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, LKj Direktorat Ikan Air Payau periode Triwulan II tahun 2025 disusun dengan sistematika sebagai berikut:

1. **Ikhtisar Eksekutif**, bagian ini menyajikan gambaran menyeluruh secara ringkas tentang capaian kinerja Direktorat Ikan Air Payau selama kurun waktu Triwulan II tahun 2025.
2. **Bab I Pendahuluan**, pada bab ini disajikan hal-hal umum tentang Direktorat Ikan Air Payau serta uraian singkat tentang tugas pokok dan fungsi Direktorat Ikan Air Payau, termasuk latar belakang, maksud dan tujuan penulisan LKj.
3. **Bab II Perencanaan dan Penetapan Kinerja**, pada bab ini disajikan rencana strategis, gambaran singkat mengenai sasaran dan kebijakan dan program Direktorat Jenderal Perikanan Budi Daya pada tahun 2025 – 2029, rencana kerja dan anggaran tahun 2025, penetapan kinerja Direktorat Ikan Air Payau serta pengukuran/pengelolaan kinerja Direktorat Ikan Air Payau.
4. **Bab III Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan**, pada bab ini disajikan prestasi Indikator Kinerja Utama (IKU) Direktorat Ikan Air Payau serta evaluasi dan analisis kinerja. Dalam bab ini juga disampaikan akuntabilitas keuangan yang mencakup alokasi dan realisasi anggaran termasuk pula penjelasan tentang kinerja anggaran.
5. **Bab IV Penutup**, pada bab ini disajikan tinjauan secara umum tentang keberhasilan, kegagalan serta permasalahan dan kendala utama. Dalam bab ini juga disampaikan saran pemecahan masalah yang akan dilaksanakan pada tahun berikutnya berupa perbaikan perencanaan, kebijakan, dan perbaikan pelaksanaan program/kegiatan.

BAB II. PERENCANAAN DAN PENETAPAN KINERJA

2.1. Rencana Strategis Tahun 2025 – 2029

Berdasarkan Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 91 Tahun 2024 telah diterbitkan Rencana Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan Tahun 2025 sebagaimana telah ditetapkan dengan Peraturan Presiden Nomor 109 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2025 yang merupakan dokumen perencanaan pembangunan tahunan yang disusun dalam masa transisi, menjadi langkah awal pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) Tahun 2025 – 2045.

RKP Tahun 2025 dengan tema "Akselerasi Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan" diarahkan untuk meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi, Indeks Modal Manusia, Nilai Tukar Nelayan, dan menurunkan Tingkat Pengangguran Terbuka, Rasio Gini, Tingkat Kemiskinan dan/atau Kemiskinan Ekstrem. Delapan (8) Prioritas Nasional (PN) dalam RKP Tahun 2025 untuk mendukung pencapaian sasaran dalam RPJPN 2025–2045 dan RPJMN 2025–2029 terdiri atas: (1) memperkuat ideologi Pancasila, demokrasi, dan Hak Asasi Manusia (HAM); (2) memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian Bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi Syariah, ekonomi digital, ekonomi hijau, dan ekonomi biru; (3) melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industry di sentra produksi melalui peran aktif koperasi; (4) memperkuat pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda, dan penyandang disabilitas; (5) melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis Sumber Daya Alam (SDA) untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri; (6) Membangun dari Desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi, dan pemberantasan kemiskinan; (7) memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan; (8) memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam dan budaya, serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.

Arah dan kebijakan KKP Tahun 2025 dilaksanakan dengan prinsip ekonomi biru sebagaimana tuntutan pembangunan global, terdiri atas: (1) memperluas kawasan konservasi laut; (2) penangkapan ikan terukur berbasis kuota penangkapan ikan; (3)

Pengembangan perikanan budi daya di laut, pesisir, dan darat yang berkelanjutan; (4) pengawasan dan pengendalian wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil; dan (5) pembersihan sampah plastik di laut melalui gerakan partisipasi nelayan atau bulan cinta laut.

Terkait dengan program pembangunan perikanan budi daya, KKP memiliki beberapa rencana kegiatan antara lain produksi benih dan induk unggul, produksi pakan ikan, pembinaan sertifikasi subsektor pembudidayaan ikan, monitoring residu, penyakit ikan, dan pemantauan resistensi anti mikroba, pengembangan budidaya komoditas unggulan berbasis klaster, pembangunan kampung perikanan budidaya, bantuan benih dan calon induk ikan, pengelolaan irigasi tambak partisipati (PITAP). Klaster kawasan revitalisasi tambak udang dan bandeng, dan Infrastructure Improvement for Shrimp Aquaculture (IISAP)

2.2. Sasaran Strategis

Sasaran strategis pembangunan perikanan budi daya merupakan kondisi yang diinginkan dapat dicapai oleh Direktorat Ikan Air Payau sebagai suatu *outcome/impact* dari program yang dilaksanakan. Dalam penyusunan peta strategi terdapat empat perspektif, yaitu *stakeholders prespective*, *customer perspective*, *internal process perspective*, dan *learning and growth perspective* yang dijabarkan dalam 2 (dua) Sasaran Kegiatan dengan masing-masing Indikator Kinerja sebagai berikut :

1. Terkelolanya Sistem Perikanan Budi Daya Ikan Air Payau:
 - a. Potensi Kawasan Budidaya Ikan Air Payau (Lokasi)
 - b. Produksi Calon Induk Unggul Ikan Air Payau yang Diproduksi UPT (Ekor);
 - c. Produksi Calon Induk Unggul Udang untuk bantuan dan operasional UPT (Ekor);
 - d. Benih Ikan Air Payau yang Disalurkan ke Masyarakat (Ekor);
 - e. Benih Udang yang Disalurkan ke Masyarakat (Ekor);
 - f. Unit Budi Daya Ikan Air Payau yang Dibina Penerapan Sertifikasi Perikanan Budi Daya (CBIB, CPIB, CPPIB, CPOIB, CDOIB) (Unit);
 - g. Sampel Nutrisi Pakan Ikan Air Payau yang di uji
 - h. Sampel Penyakit Ikan Air Payau yang Diuji dalam Rangka Pelayanan Laboratorium Kesehatan Ikan dan Lingkungan (Sampel);
 - i. Sampel Monitoring Residu Ikan Air Payau yang Diuji (Sampel);
 - j. Sampel Monitoring Penyakit Ikan Air Payau yang di yang Diuji (Sampel);
 - k. Sampel Surveilans Resistensi Antimikroba (AMU/AMR) Ikan Air Payau (Sampel);
 - l. Kebijakan Tata Kelola Bidang Budi Daya Ikan Air Payau (Rekomendasi Kebijakan);ss

2. Terwujudnya Layanan Dukungan Manajemen yang Baik Lingkup Direktorat Ikan Air Payau:
 - a. Nilai PM SAKIP Satker Direktorat Ikan Air Payau (Nilai);
 - b. Indeks Profesionalitas ASN Satker Direktorat Ikan Air Payau (Indeks);
 - c. Persentase Penyelesaian Temuan BPK Lingkup Direktorat Ikan Air Payau (Persen);
 - d. Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja Satker Direktorat Ikan Air Payau (Persen);
 - e. Persentase Layanan Perkantora Direktorat Ikan Air Payau (Persen);
 - f. Nilai Pengawasan Kearsipan Internal Satker Direktorat Ikan Air Payau (Nilai);
 - g. Persentase Penyelesaian SOP Satker Direktorat Ikan Air Payau (Persen)

2.3. Penetapan Kinerja Tahun 2025

Perjanjian Kinerja pada dasarnya adalah pernyataan komitmen yang merepresentasikan tekad dan janji untuk mencapai kinerja yang jelas dan terukur dalam rentang waktu satu tahun tertentu, dengan mempertimbangkan sumber daya yang dikelola. Tujuan khusus perjanjian kinerja adalah untuk: (1) meningkatkan akuntabilitas, transparansi, dan kinerja aparatur sebagai wujud nyata komitmen antara penerima amanah dengan pemberi amanah; (2) sebagai dasar penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi; dan (3) menciptakan tolak ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja.

Perjanjian kinerja Dit. Ikan Air Payau tahun 2025 dapat dilihat pada gambar berikut:



KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN DIREKTORAT JENDERAL PERIKANAN BUDI DAYA

JALAN MEDAN MERDEKA TIMUR NOMOR 16
JAKARTA 10110 KOTAK POS 4130 JKP 10041
TELEPON (021) 3519070 (LACAK), FAKSIMILE (021) 3514772
LAMAR www.kkp.go.id SUREL ditjenpb@kkp.go.id

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025 DIREKTORAT IKAN AIR PAYAU

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, akuntabel dan berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **Fernando Jongguran Simanjuntak**

Jabatan : Direktur Ikan Air Payau

Selanjutnya disebut **Pihak Pertama**

Nama : **Tb Haeru Rahayu**

Jabatan : Direktur Jenderal Perikanan Budi Daya

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut **Pihak Kedua**

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, 8 April 2025

Pihak Kedua
Direktur Jenderal Perikanan Budi Daya



Ditandatangani
Secara Elektronik

Tb Haeru Rahayu

Pihak Pertama
Direktur Ikan Air Payau



Ditandatangani
Secara Elektronik

Fernando Jongguran Simanjuntak

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025 DIREKTORAT IKAN AIR PAYAU

SASARAN KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA KEGIATAN		TARGET
1.	Terkelolanya Sistem Perikanan Budi Daya Ikan Air Payau	1.	Potensi Kawasan Budidaya Ikan Air Payau (Lokasi)	4
		2.	Produksi Calon Induk Unggul Ikan Air Payau yang Diproduksi oleh UPT (Ekor)	6.411
		3.	Produksi Induk Unggul Udang untuk Bantuan dan Operasional UPT (Ekor)	191.744
		4.	Benih Ikan Air Payau yang Disalurkan ke Masyarakat (Ekor)	2.964.669
		5.	Benih Udang yang Disalurkan ke Masyarakat (Ekor)	40.058.988
		6.	Unit Budi Daya Ikan Air Payau yang Dibina Penerapan Sertifikasi Bidang Perikanan Budi Daya (CBIB dan CPIB)	200
		7.	Sampel Nutrisi Pakan Ikan Air Payau yang diuji	122
		8.	Sampel Penyakit Ikan Air Payau yang Diuji dalam rangka Pelayanan Laboratorium Kesehatan Ikan dan Lingkungan (Sampel)	5.376
		9.	Sampel Monitoring Residu Ikan Air Payau yang Diuji (Sampel)	250
		10.	Sampel Monitoring Penyakit Ikan Air Payau yang Diuji (Sampel)	210
		11.	Sampel Surveilans Resistensi Antimikroba Ikan Air Payau (AMR) yang Diuji (Sampel)	151
		12.	Kebijakan Tata Kelola Bidang Budi Daya Ikan Air Payau (rekomendasi kebijakan)	3
2.	Tata Kelola Pemerintahan yang Baik di Direktorat Ikan Air Payau	13.	Nilai PM SAKIP Satker Direktorat Ikan Air Payau (Nilai)	84
		14.	Indeks Profesionalitas ASN satker Direktorat Ikan Air Payau (Indeks)	81
		15.	Persentase penyelesaian temuan BPK lingkup satker Direktorat Ikan Air Payau (Persen)	100

SASARAN KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA KEGIATAN		TARGET
		16.	Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja satker Direktorat Ikan Air Payau (Persen)	85
		17.	Persentase Layanan Perkantoran satker Direktorat Ikan Air Payau (Persen)	80
		18.	Nilai pengawasan kearsipan internal satker Direktorat Ikan Air Payau (Nilai)	70
		19.	Persentase Penyelesaian SOP Satker Direktorat Ikan Air Payau (Persen)	65

Jakarta, 8 April 2025

Pihak Kedua
Direktur Jenderal Perikanan Budi Daya



**Ditandatangani
Secara Elektronik**

Tb Haeru Rahayu

Pihak Pertama
Direktur Ikan Air Payau



**Ditandatangani
Secara Elektronik**

Fernando Jongguran Simanjuntak

DATA ANGGARAN:

NO.	KEGIATAN	ANGGARAN (Rp.)
1.	Pengelolaan Budi Daya Ikan Air Payau	1.261.928.000
2.	Dukungan Manajemen Internal Lingkup Direktorat Ikan Air Payau	324.977.000
Total Anggaran Direktorat Ikan Air Payau Tahun 2025		1.586.905.000

Jakarta, 8 April 2025

Pihak Kedua
Direktur Jenderal Perikanan Budi Daya



**Ditandatangani
Secara Elektronik**

Tb Haeru Rahayu

Pihak Pertama
Direktur Ikan Air Payau



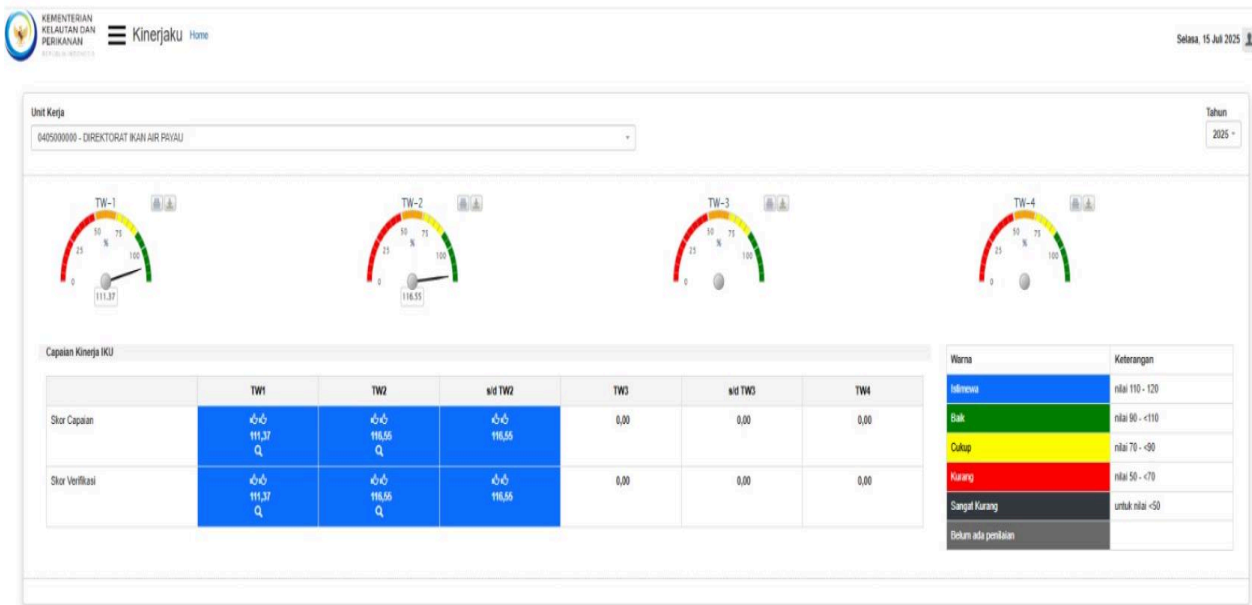
**Ditandatangani
Secara Elektronik**

Fernando Jongguran Simanjuntak

Gambar 4. Perjanjian Kinerja Dit. Ikan Air Payau Tahun 2025

2.4. Pengukuran Capaian Kinerja Tahun 2025

Pengukuran tingkat capaian IKU dilakukan dengan berpedoman pada formula penghitungan yang telah ditetapkan dalam informasi Indikator Kinerja atau Manual IKU. Selanjutnya nilai capaian tersebut dihitung dengan membandingkan antara realisasi capaian dengan target yang telah ditetapkan. Pengukuran capaian kinerja dilakukan secara berkala melalui penyusunan laporan kinerja Triwulanan yang didukung dengan implemementasi Aplikasi BSC <http://kinerjaku.kkp.go.id> yang merupakan Sistem Aplikasi Pengukuran Kinerja berbasis informasi teknologi. Berikut hasil pengukuran kinerja sampai dengan periode Triwulan II tahun 2025 berdasarkan hasil penilaian pada aplikasi kinerjaku.



Gambar 5. Hasil pengukuran kinerja sampai Triwulan II tahun 2025

BAB III. AKUNTABILITAS KINERJA

3.1. Capaian Kinerja Organisasi

Kegiatan pembangunan perikanan budi daya pada tahun 2025 sebagaimana Perjanjian Kinerja (PK) Direktur Ikan Air Payau menitikberatkan pada 2 (dua) Sasaran Kegiatan dengan 21 (dua puluh satu) Indikator Kinerja untuk menunjang pencapaian visi dan misi DJPB dan hasil pengukuran kinerja inilah yang dilaporkan dalam Laporan Kinerja (LKj) tingkat Eselon II.

Berdasarkan sistem pelaporan pada aplikasi <http://kinerjaku.kkp.go.id> diperoleh Nilai Pencapaian sebesar 111,37% (*Seratus sebelas koma tiga tujuh persen*). Adapun rekapitulasi capaian kinerja Direktorat Ikan Air Payau pada periode Triwulan I tahun 2025 seperti pada tabel berikut.

Tabel 2. Capaian Sasaran Strategis Direktorat Ikan Air Payau Selama Periode Triwulan II Tahun 2025

SASARAN KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA KEGIATAN		TARGET TAHUNAN (2025)	TARGET TW II	REALISASI	PERSENTASE REALISASI
1.	Terkelolanya Sistem Perikanan Budi Daya Ikan Air Payau	1.	Potensi Kawasan Budidaya Ikan Air Payau (Lokasi)	-	-	-	-
		2.	Produksi Calon Induk Unggul Ikan Air Payau yang diproduksi UPT (ekor)	6.411	1.565	2017	128,88
		3.	Produksi Calon Induk Unggul Udang yang Diproduksi UPT (ekor)	191.744	18.991	28.944	152,41
		4.	Benih Ikan Air Payau yang Disalurkan ke Masyarakat (ekor)	2.964.669	556.600	671.000	120,55
		5.	Benih Udang yang Disalurkan ke Masyarakat (ekor)	40.058.988	11.000.000	11.911.350	108,29
		6.	Unit Budi Daya Ikan Air Payau yang Dibina Penerapan Sertifikasi Perikanan Budi Daya (CBIB, CPIB, CPPIB, CPOIB, CDOIB) (Unit)	200	-	-	-
		7.	Sampel Nutrisi Pakan dan Obat Ikan yang Diuji (sampel)	30	30	159	530,00

SASARAN KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA KEGIATAN		TARGET TAHUNAN (2025)	TARGET TW II	REALISASI	PERSENTASE REALISASI
		8.	Sampel Penyakit Ikan Air Payau yang Diuji dalam Rangka Pelayanan Laboratorium Kesehatan Ikan dan lingkungan (sampel)	5.376	2.688	8816	327,98%
		9	Sampel Monitoring Residu Ikan Air Payau yang Diuji (sampel)	250	-	-	-
		10.	Sampel Monitoring Penyakit Ikan Air Payau yang Diuji (sampel)	210	-	-	-
		11.	Sampel Surveilans Resistensi Antimikroba (AMU/AMR) Ikan Air Payau (sampel)	151	77	119	154,55
		12.	Kebijakan Tata Kelola Bidang Budi Daya Ikan Air Payau (rekomendasi kebijakan)	3	-	-	-
2	Terwujudnya Layanan Dukungan Manajemen yang Baik Lingkup Direktorat Ikan Air Payau	13.	Nilai PM SAKIP Satker Direktorat Ikan Air Payau (nilai)	84	-	-	-
		14.	Indeks Profesionalitas ASN Satker Direktorat Ikan Air Payau (indeks)	81	74	78,22	105,70
		15.	Persentase penyelesaian temuan BPK Lingkup Direktorat Ikan Air Payau (persen)	100	-	-	-
		16.	Persentase rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja Satker Direktorat Ikan Air Payau (persen)	85	85	100	117,65
		17.	Persentase layanan perkantoran Direktorat Ikan Air Payau (persen)	80	80	98,26	122,83
		18.	Nilai pengawasan kearsipan internal Satker Direktorat Ikan Air Payau (nilai)	70	-	-	-
		19.	Persentase Penyelesaian SOP Satker Direktorat Ikan Air Payau (persen)	65	-	-	-

3.2. Analisis Capaian Kinerja

3.2.1. Sasaran Kegiatan (SK-1) : Terkelolanya Sistem Perikanan Budi Daya Ikan Air Payau

IKU 1. Potensi Kawasan Budidaya Ikan Air

Potensi Kawasan Budi daya Ikan Air Payau merupakan lokasi yang akan dikembangkan oleh Direktorat Ikan Air Payau dalam upaya mendukung peningkatan produksi budi daya ikan air payau. Kegiatan ini dilaksanakan dalam rangka mendukung pencapaian misi Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia (Asta Cita), khususnya dalam pilar yang berkaitan dengan peningkatan kemandirian pangan, pengentasan kemiskinan, dan pemerataan ekonomi di seluruh wilayah Indonesia. Sektor perikanan budidaya air payau memiliki peran krusial dalam mencapai tujuan tersebut. Pengukuran indikator kinerja ini adalah menghitung jumlah lokasi yang akan dikembangkan dengan target sesuai dengan tabel berikut :

Tabel 3.Target Potensi Kawasan Budi daya Ikan Air Payau Tahun 2025

No	Ruang lingkup	Target (lokasi)
1	Identifikasi Potensi Lokasi Budi Daya Ikan Air Payau	1
2	Revitalisasi Tambak Pantura di Jawa Barat	1
3	Budi Daya Ikan Nila Salin (BINS) di Kabupaten Kerawang	1
4	Budidaya Udang Terintegrasi di Waingapu Kabupaten Sumba Timur / Integrated Shrimp Farming (ISF)	1
	Total	4

Identifikasi potensi ini tidak hanya berfokus pada aspek teknis dan ketersediaan lahan, tetapi juga mempertimbangkan keberlanjutan lingkungan, dampak sosial ekonomi bagi masyarakat lokal, serta potensi integrasi dengan teknologi modern untuk peningkatan produktivitas dan efisiensi. Diharapkan, hasil identifikasi ini akan menjadi dasar penyusunan kebijakan dan program pengembangan perikanan budidaya air payau yang lebih terarah, inklusif, dan berkelanjutan, demi tercapainya kedaulatan pangan dan peningkatan kesejahteraan pembudidaya di seluruh Nusantara.

Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat bahwa target yang ditetapkan tahun

2025 untuk indikator kinerja ini adalah 4 lokasi. Perhitungan capaian untuk indikator kinerja ini belum bisa dilaksanakan dikarenakan perhitungan dilakukan pada akhir tahun atau sistem perhitungan tahunan. Rencana aksi pada periode yang akan datang yaitu meningkatkan kinerja dalam rangka mencapai target yang telah ditetapkan.

Progres pekerjaan sampai dengan triwulan II diantaranya :

a. Identifikasi Potensi Lokasi Budi Daya Ikan Air Payau

Kegiatan identifikasi Potensi Lokasi Budi Daya Ikan Air Payau dilakukan di 4 (empat) Kabupaten di Provinsi Jawa Tengah, diantaranya : Kabupaten Pekalongan, Kota Pekalongan, Kabupaten Brebes dan Kabupaten Pemalang. Sampai dengan Triwulan II 2025 dalam rangka identifikasi potensi lokasi budi daya ikan air payau sudah dilakukan pengumpulan data awal berupa rekapitulasi sebaran tambak di 4 Kabupaten lokus dan pengumpulan data pola ruang serta Perda RTRW yang berlaku. Selain pengumpulan data tersebut telah dilakukan persiapan dokumen kontrak untuk KLHS.

b. Revitalisasi Tambak Pantura

Progres Penyelesaian Revitalisasi Tambak Pantura telah terbit Kepmen Kehutanan No 274 Tahun 2025 tentang Penetapan KHKP Revitalisasi Tambak Pantura dan saat ini DJPB sedang mengajukan Permohonan pelaksanaan tata batas wilayah KHKP kepada Kementerian Kehutanan.

Secara Paralel, saat ini Revitalisasi Tambak Pantai Utara (Pantura) di Jawa Barat juga diusulkan sebagai sebagai Proyek Strategis Nasional (PSN) sesuai dengan surat Menteri Kelautan dan Perikanan nomor B.669/MEN-KP/VII/2025 kepada Menteri Koordinator Bidang Perekonomian.

c. Budi Daya Ikan Nila Salin (BINS)

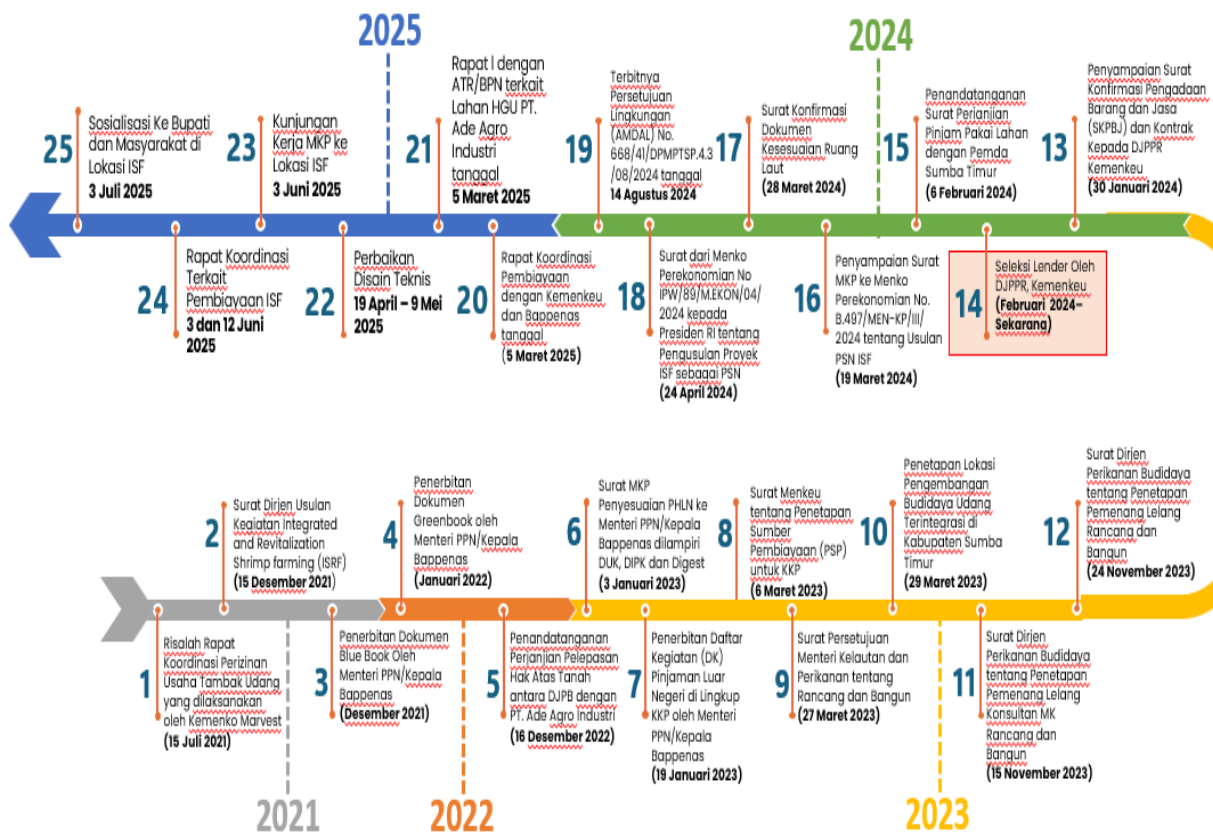
Progres pekerjaan Penyelesaian Modeling Budi Daya Ikan Nila Salin (BINS) di Eks Tambak Inti Rakyat (TIR) Karawang sampai dengan TW II

2025 telah terlaksana sampai dengan penelaahan dokumen pengajuan Anggaran Belanja Tambahan oleh Bagian Anggaran Bendahara Umum Negara (BA-BUN).

d. Integrated Shrimp Farming (ISF)

ISF merupakan kegiatan pembangunan tambak udang terintegrasi di desa Palakahembi dan Kelurahan Watumbaka, Kec. Pandawai, Kab Sumba Timur NTT, yang bertujuan Sebagai *benchmark* model budidaya terintegrasi yang ramah lingkungan, dengan menerapkan *Good Aquaculture Practices* (GAP) dan Prinsip eco-efficiency di Sepanjang Mata Rantai Nilai (*Value Chain*).

Progres pekerjaan ISF sampai dengan Triwulan II Tahun 2025 dapat dilihat pada bagan di bawah.



Gambar 6. Progres kegiatan *Integrated Shrimp Farming*

Tabel 4. Capaian IKU . Potensi Kawasan Budidaya Ikan Air Payau

Nama SS : Terkelolanya Sistem Perikanan Budi Daya Ikan Air Payau						
Nama Indikator : Potensi Kawasan Budidaya Ikan Air Payau						
TW II 2025			Realisasi TW II 2024	Perbandingan Realisasi TW II 2025 Thdp TW II 2024 (%)	Target 2025	Realisasi Terhadap Target Tahunan (%)
Target	Realisasi	Capaian (%)				
-	-	-	-	-	4	-

Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat bahwa target yang ditetapkan tahun 2025 untuk indikator kinerja ini adalah 4 Lokasi. Pada indikator kinerja ini tidak bisa dibandingkan dengan tahun lalu karena pada periode Triwulan II tahun sebelumnya juga belum ada capaian atau target yang ditentukan. Perhitungan capaian untuk indikator kinerja ini belum bisa dilaksanakan dikarenakan perhitungan dilakukan pada akhir tahun.

IKU 2. Produksi Calon Induk Unggul Ikan Air Payau yang Diproduksi UPT

Kualitas induk mempengaruhi kualitas benih yang dihasilkan dan berdampak pada keberhasilan kegiatan budidaya secara keseluruhan. Induk yang baik adalah induk yang dihasilkan dari proses seleksi induk yang jelas sehingga secara ketertelusuran dapat dipertanggung jawabkan asal usul dari induk tersebut. Unit Pelaksana Teknis (UPT) Direktorat Jenderal Perikanan Budi Daya (DJPB) memiliki tugas untuk memproduksi dan menyediakan induk unggul. Beberapa komoditas unggulan dan memiliki nilai ekonomis tinggi telah berhasil diproduksi secara rutin oleh UPT DJPB. Dalam upaya peningkatan produksi perikanan budidaya, maka produksi induk menjadi salah upaya kunci dalam pencapaian target produksi tersebut.

Indikator kinerja ini mengukur jumlah produksi calon induk unggul ikan air payau yang dihasilkan oleh UPT DJPB yang memproduksi calon induk ikan air payau. Adapun peruntukkan dari hasil produksi calon induk ikan air payau ini dapat disalurkan kepada unit pembenihan di masyarakat. Unit pembenihan yang dapat menerima bantuan ini adalah unit pembenihan perseorangan, kelompok atau unit pembenihan ikan milik

daerah yang mampu melakukan pemeliharaan induk dan pembenihan secara menyeluruh untuk memproduksi benih. Ketersediaan sarana dan SDM diharapkan dapat dipenuhi oleh unit pembenihan yang akan mendapatkan calon induk ikan air payau ini.

Target Indikator Kinerja Produksi Calon Induk Ikan Air Payau untuk Bantuan dan Operasional UPT Tahun 2025 ditetapkan sebanyak 6.411 ekor yang diproduksi oleh Unit Pelaksana Teknis (UPT) lingkup Direktorat Jenderal Perikanan Budi Daya (DJPB) yaitu BBPBAP Jepara, BPBAP Situbondo, BPBAP Ujung Batee, BPBAP Takalar dan BLUPPB Karawang. Target produksi calon induk ikan air payau untuk bantuan dan operasional UPT Triwulan II sebanyak 1.565 ekor (kumulatif) dan realisasi sampai dengan Triwulan II sebanyak 2.017 ekor (kumulatif) atau mencapai 128,88% sesuai Tabel 4.

Tabel 5. Capaian IKU Produksi Calon Induk Unggul Ikan Air Payau yang Diprod UPT

Nama SS : Terkelolanya Sistem Perikanan Budi Daya Ikan Air Payau						
Nama Indikator : Produksi Calon Induk Unggul Ikan Air Payau yang Diproduksi UPT						
TW II 2025			Realisasi TW II 2024	Perbandingan Realisasi TW II 2025 Thdp TW II 2024 (%)	Target 2025	Realisasi Terhadap Target Tahunan (%)
Target	Realisasi	Capaian (%)				
1565	2017	128,88	-	-	6.411	31,46

Berdasarkan Tabel 4 realisasi capaian sampai dengan periode 30 Juni 2025 sebanyak 2.017 ekor atau mencapai 31,46% dari target Tahun 2025. Total capaian produksi calon induk ikan air payau Triwulan II sebanyak 2.017 ekor, jika dipresentasikan realisasi sebesar 128,88 % dari pada target yang ditentukan. Pada indikator kinerja ini tidak bisa dibandingkan dengan capaian tahun lalu karena baru di laksanakan pada tahun ini. Rencana aksi pada periode yang akan datang yaitu meningkatkan kinerja dan koordinasi dengan UPT yang memproduksi calon induk sehingga target yang telah ditetapkan dapat tercapai.

IKU 3. Produksi Calon Induk Unggul Udang untuk Bantuan dan Operasional UPT

Kualitas induk mempengaruhi kualitas benih yang dihasilkan dan berdampak pada keberhasilan kegiatan budidaya secara keseluruhan. Induk yang baik adalah induk yang dihasilkan dari proses seleksi induk yang jelas sehingga secara ketertelusuran dapat dipertanggung jawabkan asal usul dari induk tersebut.

Unit Pelaksana Teknis (UPT) Direktorat Jenderal Perikanan Budi Daya (DJPB) memiliki tugas untuk memproduksi dan menyediakan induk unggul. Beberapa komoditas unggulan dan memiliki nilai ekonomis tinggi telah berhasil diproduksi secara rutin oleh UPT DJPB. Dalam upaya peningkatan produksi perikanan budidaya, maka produksi induk menjadi salah upaya kunci dalam pencapaian target produksi tersebut.

Indikator kinerja ini mengukur jumlah produksi calon induk unggul udang yang dihasilkan oleh UPT DJPB yang memproduksi calon induk udang. Adapun peruntukkan dari hasil produksi calon induk udang ini dapat disalurkan kepada unit pembenihan di masyarakat. Unit pembenihan yang dapat menerima bantuan ini adalah unit pembenihan perseorangan, kelompok atau unit pembenihan udang milik daerah yang mampu melakukan pemeliharaan induk dan pembenihan secara menyeluruh untuk memproduksi benih udang. Ketersediaan sarana dan SDM diharapkan dapat dipenuhi oleh unit pembenihan yang akan mendapatkan calon induk udang ini. Adapun Capaian pada IKU ini dapat dilihat pada Tabel 5.

Tabel 6. Capaian IKU Produksi Calon Induk Unggul Udang untuk Bantuan dan Operasional UPT

Nama SS : Terkelolanya Sistem Perikanan Budi Daya Ikan Air Payau						
Nama Indikator : Produksi Calon Induk Unggul Udang untuk Bantuan dan Operasional UPT						
TW II 2025			Realisasi TW II 2024	Perbandingan Realisasi TW II 2025 Thdp TW II 2024 (%)	Target 2025	Realisasi Terhadap Target Tahunan (%)
Target	Realisasi	Capaian (%)				
18.911	28.944	152,41	-	-	191.744	15,10

Berdasarkan Tabel 6 dapat dilihat bahwa realisasi capaian sampai dengan periode 30 Juni 2025 sebanyak 28.944 ekor atau mencapai 15,10% dari target Tahun 2025. Total capaian produksi calon induk udang Triwulan II sebanyak 28.944 ekor, dipergunakan untuk bantuan ke masyarakat sebanyak 6.948 ekor dan sebanyak 21.996 ekor operasional UPT untuk memproduksi calon induk dan/atau benih. Rekapitulasi bantuan calon induk udang yang disalurkan ke masyarakat Tabel 7.

Tabel 7. Rekapitulasi Bantuan Calon Induk Udang yang Disalurkan ke Masyarakat

No.	Komoditas	Jumlah (Ekor)	Nama Kelompok	Kab/Kota	Provinsi	UPT Pelaksana
1	Vaname	1.000	Central Naupli Vaname	Lampung Selatan	Lampung	BPIU2K Karangasem
2	Vaname	2.000	Central Naupli Vaname	Lampung Selatan	Lampung	BPIU2K Karangasem
3	Vaname	1.000	Central Naupli Vaname	Lampung Selatan	Lampung	BPIU2K Karangasem
4	Vaname	1.000	UD. Sinar Benur Lembae	Barru	Sulawesi Selatan	BPBAP Takalar
5	Vaname	1.000	UD. Nirwana Bahari	Barru	Sulawesi Selatan	BPBAP Takalar
6	Vaname	948	UD.Mutiara Samudra Benur	barru	Sulawesi Selatan	BPBAP Takalar
Total		6.948				

IKU 4. Benih Ikan Air Payau yang Disalurkan ke Masyarakat

Benih adalah ikan yang belum dewasa dengan ukuran, bentuk dan umur tertentu yang akan digunakan untuk kegiatan pembudidayaan ikan. Penggunaan benih berkualitas baik merupakan salah satu penentu keberhasilan usaha budi daya. Adapun benih berkualitas ditandai dengan ciri-ciri sebagai berikut antara lain:

1. Berasal dari unit pembenihan yang bersertifikasi;
2. Sehat, organ tubuh lengkap dan tidak cacat;
3. Ukuran benih seragam;
4. Responsif terhadap pemberian pakan;
5. Bebas pathogen dan bebas penyakit; dan
6. Diproduksi sesuai dengan standar produksi benih.

Unit Pelaksana Teknis (UPT) Direktorat Jenderal Perikanan Budi Daya (DJPB) memiliki tugas untuk memproduksi dan menyediakan benih bermutu. Beberapa komoditas unggulan dan memiliki nilai ekonomis tinggi telah berhasil diproduksi secara rutin oleh UPT DJPB. Dalam upaya peningkatan produksi perikanan budidaya, maka

produksi benih menjadi salah upaya kunci dalam pencapaian target produksi.

Indikator kinerja ini mengukur jumlah produksi benih ikan air payau yang dihasilkan oleh UPT DJPB yang memproduksi benih ikan air payau. Adapun peruntukkan dari hasil produksi benih ikan air payau ini dapat disalurkan kepada pembudi daya ikan air payau baik perseorangan maupun kelompok yang berkomitmen dalam usaha pembudidayaan ikan dan mampu mengelola produksi pembesaran budi daya ikan air payau sesuai dengan kaidah-kaidah cara budi daya ikan yang baik. .

Target IKU Benih Ikan Air Payau yang Disalurkan ke Masyarakat pada periode Triwulan II tahun 2025 adalah 556.600 ekor, dari target tahun 2025 sebanyak 2.964.669 ekor. Capaian realisasi IKU tersebut sampai dengan TW II adalah 671.000 ekor, sedangkan jika dibandingkan dengan target tahunan didapatkan capaian sebesar 22,63%.

Tabel 8. Capaian IKU Benih Ikan Air Payau yang Disalurkan ke Masyarakat

Nama SS : Terkelolanya Sistem Perikanan Budi Daya Ikan Air Payau						
Nama Indikator : Benih Ikan Air Payau yang Disalurkan ke Masyarakat						
TW II 2025			Realisasi TW II 2024	Perbandingan Realisasi TW II 2025 Thdp TW II 2024 (%)	Target 2025	Realisasi Terhadap Target Tahunan (%)
Target	Realisasi	Capaian (%)				
556.600	671.000	120,55	-	-	2.964.669	22,63

Berdasarkan Tabel diatas dapat dilihat bahwa realisasi capaian sampai dengan periode 30 Juni 2025 sebanyak 671.000 ekor atau mencapai 22,63% dari target Tahun 2025 jika dipresentasikan realisasi sebesar 120,55 % dari pada target yang ditentukan. Sedangkan penerima manfaat kegiatan bantuan benih ikan air payau sebanyak 16 (enam belas) kelompok UPR/HSRT/Instansi yang tersebar di 2 (dua) Provinsi dan 6 (enam) Kab/Kota dapat di lihat pada Tabel 9.

Tabel 9. Rekapitulasi Bantuan Benih Ikan Air Payau yang Disalurkan ke Masyarakat

No.	Komoditas	Jumlah (Ekor)	Nama Kelompok	Kab/Kota	Provinsi	UPT Pelaksana
1	Nila	5.000	Gampong Neuheun	Aceh Besar	Aceh	BPBAP Ujung Batee
2	Nila	1.000	Brimob Neuheun	Aceh Besar	Aceh	BPBAP Ujung Batee
3	Nila	5.000	Lembah Seulinge	Aceh Besar	Aceh	BPBAP Ujung Batee
4	Nila	3.000	Kodim 0101 Jantho	Aceh Besar	Aceh	BPBAP Ujung Batee
5	Nila	15.000	Harapan Baru	Takalar	Sulawesi Selatan	UPT BPBAP Takalar
6	Nila	10.000	TNI Lantamal VI Mks	Makassar	Sulawesi Selatan	UPT BPBAP Takalar
7	Nila	5.000	Lapas Kelas IIB Takalar	Takalar	Sulawesi Selatan	UPT BPBAP Takalar
8	Nila	100.000	Kampung Beru Lona	Takalar	Sulawesi Selatan	UPT BPBAP Takalar
9	Nila	35.000	Mu'mulu Jaya	Takalar	Sulawesi Selatan	UPT BPBAP Takalar
10	Nila	35.000	Rambaka Towata	Takalar	Sulawesi Selatan	UPT BPBAP Takalar
11	Nila	100.000	Cahaya Salekowa	Gowa	Sulawesi Selatan	UPT BPBAP Takalar
12	Nila	200	Lompo Lombea	Bantaeng	Sulawesi Selatan	UPT BPBAP Takalar
13	Bandeng	100.000	Baji Pamai	Pangkep	Sulawesi Selatan	UPT BPBAP Takalar
14	Bandeng	87.000	Baji Ampe	Pangkep	Sulawesi Selatan	UPT BPBAP Takalar
15	Bandeng	70.000	Lau Jaya	Takalar	Sulawesi Selatan	UPT BPBAP Takalar
16	Bandeng	100.000	Bontomatene Jaya 2	Takalar	Sulawesi Selatan	UPT BPBAP Takalar
Total		671.000				

IKU 5. Benih Udang yang Disalurkan ke Masyarakat

Benur adalah udang yang belum dewasa dengan ukuran, bentuk dan umur tertentu yang akan digunakan untuk kegiatan pembudidayaan udang. Penggunaan benur berkualitas baik merupakan salah satu penentu keberhasilan usaha budi daya udang, Unit Pelaksana Teknis (UPT) Direktorat Jenderal Perikanan Budi Daya (DJPB) memiliki tugas untuk memproduksi dan menyediakan benur berkualitas. Beberapa komoditas unggulan dan memiliki nilai ekonomis tinggi telah berhasil diproduksi secara rutin oleh UPT DJPB. Dalam upaya peningkatan produksi perikanan budidaya, maka produksi benur menjadi salah upaya kunci dalam pencapaian target produksi.

Indikator kinerja ini mengukur jumlah produksi benur udang yang dihasilkan oleh UPT DJPB yang memproduksi benur udang. Adapun peruntukkan dari hasil produksi benur udang ini dapat disalurkan kepada pembudi daya udang baik perseorangan maupun kelompok yang berkomitmen dalam usaha pembudidayaan udang dan mampu mengelola produksi pembesaran budi daya udang sesuai dengan kaidah-kaidah cara budi daya udang yang baik. Adapun Capaian yang diperoleh pada IKU ini dapat dilihat pada table 10.

Tabel 10. Capaian IKU Benih Udang yang Disalurkan ke Masyarakat

Nama SS : Terkelolanya Sistem Perikanan Budi Daya Ikan Air Payau						
Nama Indikator : Benih Udang yang Disalurkan ke Masyarakat						
TW II 2025			Realisasi TW II 2024	Perbandingan Realisasi TW II 2025 Thdp TW & I 2024 (%)	Target 2025	Realisasi Terhadap Target Tahunan (%)
Target	Realisasi	Capaian (%)				
11.000.000	11.911.350	108,29	-	-	40.058.988	29,73

Tabel 11. Rekapitulasi Bantuan Benih Udang yang Disalurkan ke Masyarakat

No.	Komoditas	Jumlah (Ekor)	Nama Kelompok	Kab/Kota	Provinsi	UPT Pelaksana
1	Windu	250.000	Julu Atia	Takalar	Sulawesi Selatan	BPBAP Takalar
2	Windu	250.000	Sumber Rejeki	Takalar	Sulawesi Selatan	BPBAP Takalar
3	Vaname	400.000	Sahabat Bontoa	Maros	Sulawesi Selatan	BPBAP Takalar
4	Vaname	300.000	Minasa Baji	Maros	Sulawesi Selatan	BPBAP Takalar
5	Vaname	400.000	Tompo Kassi	Maros	Sulawesi Selatan	BPBAP Takalar
6	Windu	250.000	Tamalatea	Takalar	Sulawesi Selatan	BPBAP Takalar
7	Windu	250.000	Bangkit Bersama	Takalar	Sulawesi Selatan	BPBAP Takalar
8	Vaname	500.000	Sipatuo Sipurennu	Pangkep	Sulawesi Selatan	BPBAP Takalar
9	Vaname	500.000	Cambaya	Pangkep	Sulawesi Selatan	BPBAP Takalar
10	Vaname	500.000	Harapan Parang parang	Pangkep	Sulawesi Selatan	BPBAP Takalar
11	Windu	500.000	Binanga Lau	Pangkep	Sulawesi Selatan	BPBAP Takalar
12	Windu	500.000	DG.MOMMI	Pangkep	Sulawesi Selatan	BPBAP Takalar
13	Vaname	575.000	Sipitangarri	Takalar	Sulawesi Selatan	BPBAP Takalar
14	Vaname	500.000	sipakana !	Pangkep	Sulawesi Selatan	BPBAP Takalar
15	Vaname	500.000	Sipakana 2	Pangkep	Sulawesi Selatan	BPBAP Takalar
16	Vaname	500.000	Biring Galungnge	Pinrang	Sulawesi Selatan	BPBAP Takalar
17	Vaname	500.000	Lembae	Pangkep	Sulawesi Selatan	BPBAP Takalar
18	Vaname	500.000	Lompo Tuli	Pangkep	Sulawesi Selatan	BPBAP Takalar
19	Vaname	400.000	Mitra Jaya Vannamei	Pacitan	Jawa Timur	BPIU2K Karangasem
20	Vaname	400.000	Jangkar Segoro Kidul	Pacitan	Jawa Timur	BPIU2K Karangasem
21	Vaname	800.000	Berkah Vaname	Pacitan	Jawa Timur	BPIU2K Karangasem
22	Vaname	400.000	Sedulur Makmur	Pacitan	Jawa Timur	BPIU2K Karangasem
23	Vaname	200.000	Mina Jaya	Jembrana	Bali	BPIU2K Karangasem
24	Vaname	1.000.000	Sangyang Tani	Jembrana	Bali	BPIU2K Karangasem
25	Vaname	507.150	Mina Makmur	Aceh Jeumpa Bireun	Aceh	BPBAP Ujung Batee
26	Vaname	330.750	Grima Raya	Aceh Jeumpa Bireun	Aceh	BPBAP Ujung Batee
27	Vaname	198.450	Tambak Jaya	Aceh Jeumpa Bireun	Aceh	BPBAP Ujung Batee
Total		11.911.350				

Berdasarkan Tabel 10 realisasi capaian sampai dengan periode 30 Juni 2025 sebanyak 11.911.350 ekor atau mencapai 29,73% dari target Tahun 2025. Pada Triwulan II ini terlihat juga sudah melebihi target pada periode yang sama, jika dipresentasikan realisasi sebesar 108,29% dari pada target yang ditentukan. Pada indikator kinerja ini tidak bisa dibandingkan dengan capaian tahun lalu.

Adapun penerima manfaat kegiatan bantuan benih udang sebanyak 27 (dua puluh tujuh) kelompok UPR/HSRT/Instansi yang tersebar di 4 (empat) Provinsi dan 6 (enam) Kab/Kota dapat dilihat pada Tabel 11 diatas.

IKU 6. Unit Budi Daya Ikan Air Payau yang Dibinda Penerapan Sertifikasi Perikanan Budi Daya (CBIB, CPIB, CPPIB, CPOIB, CDOIB)

Setiap unit usaha budi daya ikan baik pembenihan, pembesaran ikan diwajibkan untuk menerapkan prinsip-prinsip Cara Budi Daya Ikan yang Baik (CBIB), Cara Pembenihan Ikan yang Baik (CPIB), sedangkan usaha pendukung berupa usaha penyediaan pakan dan obat ikan juga diwajibkan menerapkan prinsip-prinsip Cara Pembuatan Pakan Ikan yang Baik (CPPIB), Cara Pembuatan Obat Ikan yang Baik (CPOIB) dan Cara Distribusi Obat Ikan yang Baik (CDOIB) dimana hal ini bertujuan untuk memberikan jaminan bahwa produk perikanan budi daya yang dihasilkan telah sesuai dengan standar dan kriteria yang ditetapkan.

Direktorat teknis Lingkup Direktorat Jenderal Perikanan Budi Daya (DJPB) diwajibkan untuk melakukan pembinaan teknis terhadap unit pembenihan, unit pembesaran, unit produksi pakan, unit produksi obat ikan dan unit distribusi obat ikan. Sebab, berdasarkan Peraturan Presiden nomor 38 tahun 2023 tentang Kementerian Kelautan dan Perikanan, terjadi perubahan tugas dan fungsi dalam kelembagaan di Kementerian Kelautan dan Perikanan. Fungsi sertifikasi dialihkan kepada Badan Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Perikanan (BP2MHKP).

Pengukuran indikator kinerja ini adalah menghitung jumlah unit pembenihan dan unit pembesaran yang dilakukan pembinaan oleh DJPB dengan target sesuai dengan tabel berikut :

Tabel 12. Target per Ruang Lingkup Pembinaan Tahun 2025

No	Ruang lingkup	Target (unit)
1	pembinaan penerapan cara budidaya ikan yang baik (CBIB)	185
2	Pembinaan penerapan cara pembenihan ikan yang baik (CPIB)	15
	Total	200

Target indikator kinerja jumlah Unit Budi Daya Ikan Air Payau yang dibina penerapan Sertifikasi Perikanan Budi Daya (CBIB dan CPIB) Tahun 2025 ditetapkan sebanyak 200 unit. Ruang lingkup pembinaan yang menjadi capaian dari Indikator Kinerja tersebut berasal dari pembinaan penerapan cara budidaya ikan yang baik (CBIB) dan penerapan cara pembenihan ikan yang baik (CPIB).

Tabel 13. Capaian IKU Unit Budi Daya Ikan Air Payau yang Dibina Penerapan Sertifikasi Perikanan Budi Daya (CBIB, CPIB, CPPIB, CPOIB, CDOIB)

Nama SS : Terkelolanya Sistem Perikanan Budi Daya Ikan Air Payau						
Nama Indikator : Unit Budi Daya Ikan Air Payau yang Dibina Penerapan Sertifikasi Perikanan Budi Daya (CBIB, CPIB, CPPIB, CPOIB, CDOIB)						
TW II 2025			Realisasi TW II 2024	Perbandingan Realisasi TW II 2025 Thdp TW I 2024 (%)	Target 2025	Realisasi Terhadap Target Tahunan (%)
Target	Realisasi	Capaian (%)				
-	-	-	-	-	200	-

Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat bahwa target yang ditetapkan tahun 2025 untuk IK ini adalah sebesar 200 unit. Pada indikator kinerja ini tidak bisa dibandingkan dengan capaian tahun lalu. Perhitungan capaian untuk indikator kinerja ini belum bisa dilaksanakan dikarenakan perhitungan dilakukan pada akhir tahun atau sistem perhitungan tahunan.

IKU 7. Sampel Nutrisi Pakan dan Obat Ikan yang Diuji

Indikator kinerja Sampel Nutrisi Pakan dan Obat Ikan yang Diuji adalah jumlah sampel nutrisi pakan, sampel obat dan sampel mutu pakan ikan air payau yang diuji oleh UPT Air Payau lingkup Ditjen Perikanan Budi Daya. Pengujian nutrisi pakan ikan meliputi parameter uji proksimat yang terdiri dari kadar protein, kadar lemak, kadar serat kasar, kadar abu dan kadar air. Sedangkan pengujian mutu pakan ikan yaitu pengujian kontaminan pakan yang terdiri atas kontaminan logam berat (Pb, Cd, dan HG), antibiotik (nitrofurantoin, kloramfenikol, oksitetrasiklin), mikotoksin (aflatoksin) dan melamin. Pengujian sampel obat ikan adalah proses untuk menilai kualitas (mutu) obat ikan yang beredar yang dilakukan di laboratorium dan hasilnya dibandingkan dengan mutu obat ikan tersebut pada saat didaftarkan. Sedangkan pengujian lapangan adalah uji yang dilakukan untuk membuktikan khasiat (eficacy) dan keamanan (safety) obat ikan pada ikan target pada kondisi sebenarnya dengan skala tertentu sesuai dengan indikasi yang tercantum pada etiket atau label. Adapun capaian Target dan Realisasi perolehan sampel pada UPT dapat dilihat pada table 14.

Tabel 14. Target dan Realisasi Capaian Sampel Nutrisi dan Mutu Pakan Ikan Payau Periode Triwulan II 2025

No	Nama UPT DJPB	Target Sampel	Realisasi hingga Triwulan II	Prosentase (%)
1	BBPBAP Jepara	34	23	68%
2	BPBAP Situbondo	29	24	83%
3	BPBAP Takalar	8	11	138%
4	BPBAP ujung Batee	8	5	63%
5	BLUPPB Karawang	7	7	100%
6	BPKIL Serang	36	89	247,22%
Total		122	159	130,32%

Pada Tabel di atas dapat dilihat bahwa Realisasi sampel yang paling banyak tercapai yaitu pada BPKIL Serang dengan perolehan 89 sampel. Pada tahun 2025 target indikator kinerja ini sebesar 122 sampel. Tidak ada anggaran khusus untuk mendukung indikator kegiatan ini. Capaian indikator kinerja ini dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 15. Capaian IKU Sampel Nutrisi Pakan dan Obat Ikan yang Diuji

Nama SS : Terkelolanya Sistem Perikanan Budi Daya Ikan Air Payau						
Nama Indikator : Sampel Nutrisi Pakan dan Obat Ikan yang Diuji						
TW II 2025			Realisasi TW II 2024	Perbandingan Realisasi TW II 2025 Thdp TW II 2024 (%)	Target 2025	Realisasi Terhadap Target Tahunan (%)
Target	Realisasi	Capaian (%)				
30	159	530	-	-	122	130,32

Berdasarkan Tabel 15 diatas terlihat bahwa realisasi capaian sampai dengan periode 30 Juni 2025 sebanyak 159 sampel atau mencapai 130,32% dari target Tahun 2025. Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat bahwa realisasi pada periode Triwulan II sudah melebihi target pada periode yang sama, jika dipresentasikan realisasi sebesar 530 % dari pada target yang ditentukan.

Pada indikator kinerja ini tidak bisa dibandingkan dengan tahun lalu karena indikator kinerja ini merupakan kegiatan baru. Rencana aksi pada periode yang akan datang yaitu meningkatkan kinerja dan berkoordinasi dengan UPT dalam rangka mencapai target yang telah ditetapkan.

IKU 8. Sampel Penyakit Ikan Air Payau yang Diuji dalam Rangka Pelayanan Laboratorium Kesehatan Ikan dan Lingkungan

Target indikator kinerja jumlah sampel Sampel Penyakit Ikan Air Payau yang Diuji dalam rangka Pelayanan Laboratorium Kesehatan Ikan dan Lingkungan (Sampel) Tahun 2025 ditetapkan sebanyak 5.377 sampel. Ruang lingkup layanan sampel yang menjadi capaian dari Indikator Kinerja tersebut berasal dari pengujian: 1) Kualitas Air, 2) Mikrobiologi (tidak termasuk sampel AMR), 3) Patologi, 4) Biomolekuler dan 5) Residu.

Sumber data perolehan capaian Indikator Sampel Penyakit Ikan Air Payau yang Diuji dalam rangka Pelayanan Laboratorium Kesehatan Ikan dan Lingkungan (Sampel) berasal dari 7 (tujuh) UPT Direktorat Jenderal Perikanan Budi Daya, yaitu : BBPBAP Ujung Batee, BPKIL Serang, BBPBAP Jepara, BPBAP Situbondo, BLUPBB Karawang, BPBAP

Takalar, dan BPIU2K Karangasem. Rincian target sampel Penyakit Ikan Air Payau yang Diuji dalam rangka Pelayanan Laboratorium Kesehatan Ikan dan Lingkungan (Sampel) dapat dilihat pada Tabel 16 berikut ini.

Tabel 16. Target Sampel Per Ruang Lingkup Pengujian Tahun 2025

No	Ruang Lingkup Pengujian	Jumlah Sampel
1	Kualitas Air	3.596
2	Mikrobiologi (diluar AMR)	680
3	Patologi	198
4	Biomolekuler	675
5	Residu	228
	Total Sampel	5.377

IKU Sampel Penyakit Ikan Air Payau yang Diuji dalam rangka Pelayanan Laboratorium Kesehatan Ikan dan Lingkungan (Sampel), telah tercantum di dalam draft renstra DJPB 2024-2029 dengan target yang ditetapkan pada tahun 2025 sebanyak 5.377 sampel. Berdasarkan capaian Indikator Kinerja di 7 (tujuh) UPT DJPB pada Triwulan II diperoleh realisasi sebanyak 8.816 sampel atau 163,96% dari target tahunan. Target tahunan dan realisasi di 7 (tujuh) UPT DJPB dapat dilihat pada Tabel 17 berikut ini.

Tabel 17. Target dan Realisasi “Sampel Penyakit Ikan Air Payau yang Diuji dalam rangka Pelayanan Laboratorium Kesehatan Ikan dan Lingkungan (Sampel)” Triwulan II Tahun 2025

No	Nama UPT DJPB	Target Sampel	Realisasi hingga Triwulan II	Prosentase (%)
1	BPBAP Ujung Batee	615	764	124,23
2	BPKIL Serang	1.231	1.789	145,33
3	BBPBAP Jepara	901	1.460	162,04
4	BPBAP Situbondo	828	1.771	213,89
5	BLUPBB Karawang	687	746	108,59
6	BPBAP Takalar	699	1.982	283,55
7	BPIU2K Karangasem	416	304	73,08
	Total	5.377	8.816	163,96

Berdasarkan data capaian Triwulan II, maka realisasi Indikator Kinerja Sampel Penyakit Ikan Air Payau yang Diuji dalam rangka Pelayanan Laboratorium Kesehatan Ikan dan Lingkungan (Sampel) telah melampaui target tahunan yang ditetapkan dengan capaian sebesar 163,96%. Hal ini dikarenakan, Laboratorium UPT DJPB memanfaatkan sisa bahan pada tahun anggaran sebelumnya dan perolehan sampel sebagian besar berasal dari sampel internal atau unit budidaya yang berada di dalam lingkungan UPT DJPB.

Tabel 18. Capaian IKU Sampel Penyakit Ikan Air Payau yang Diuji dalam Rangka Pelayanan Laboratorium Kesehatan Ikan dan Lingkungan

Nama SS : Terkelolanya Sistem Perikanan Budi Daya Ikan Air Payau						
Nama Indikator : Sampel Penyakit Ikan Air Payau yang Diuji dalam Rangka Pelayanan Laboratorium Kesehatan Ikan dan Lingkungan						
TW II 2025			Realisasi TW II 2024	Perbandingan Realisasi TW II 2025 Thdp TW II 2024 (%)	Target 2025	Realisasi Terhadap Target Tahunan (%)
Target	Realisasi	Capaian (%)				
2688	8816	330,43	-	-	5.376	163,96

Berdasarkan Tabel 18 diatas dapat dilihat realisasi capaian diperoleh 8.816 atau mencapai 163,96 dari target Tahun 2025. Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat bahwa realisasi pada periode Triwulan II sudah melebihi target pada periode yang sama, jika dipresentasikan realisasi sebesar 330,43% dari pada target yang ditentukan. Pada indikator kinerja ini tidak bisa dibandingkan dengan capaian tahun lalu. Rencana aksi pada periode yang akan datang yaitu meningkatkan kinerja dan koordinasi dengan UPT yang memberikan pelayanan laboratorium kesehatan ikan dan lingkungan air payau sehingga target yang telah ditetapkan dapat tercapai.

IKU 9. Sampel Monitoring Residu Ikan Air Payau yang Diuji

Indikator kinerja sampel monitoring residu ikan air payau yang diuji (sampel) merupakan jumlah sampel residu ikan air payau yang dimonitor pada unit pembesaran di

4 (empat) Provinsi dengan target 250 sampel. Pelaksana monitoring residu terdapat di Provinsi Sumatera Selatan (Udang), Lampung (Udang), Jawa Timur (Udang dan Bandeng) dan Nusa Tenggara Barat (Udang). Kegiatan monitoring residu ikan air payau dilaksanakan oleh Dinas Provinsi dengan dukungan pembiayaan dari Tugas Pembantuan. Selanjutnya, pengujian sampel dilakukan di Laboratorium Swasta maupun laboratorium milik Pemerintah (UPT-Ditjen Perikanan Budi Daya).

Tabel 19. Capaian IKU Sampel Monitoring Residu Ikan Air Payau yang Diuji

Nama SS : Terkelolanya Sistem Perikanan Budi Daya Ikan Air Payau						
Nama Indikator : Sampel Monitoring Residu Ikan Air Payau yang Diuji						
TW II 2025			Realisasi TW II 2024	Perbandingan Realisasi TW II 2025 Thdp TW II 2024 (%)	Target 2025	Realisasi Terhadap Target Tahunan (%)
Target	Realisasi	Capaian (%)				
-	-	-	-	-	250	-

Capaian Indikator Kinerja “Sampel Monitoring Residu Ikan Air Payau yang Diuji” pada Triwulan II Tahun 2025 belum terealisasi. Pada indikator kinerja ini tidak bisa dibandingkan dengan tahun lalu karena indikator kinerja ini merupakan kegiatan baru. Perhitungan capaian untuk indikator kinerja ini belum bisa dilaksanakan dikarenakan perhitungan dilakukan pada akhir akhir tahun. Rencana aksi pada periode yang akan datang yaitu meningkatkan kinerja dan berkoordinasi dengan Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sumatera Selatan, Lampung, Jawa Timur dan Nusa Tenggara Barat dalam rangka mencapai target yang telah ditetapkan.

IKU 10 Sampel Monitoring Penyakit Ikan Air Payau yang Diuji

Kegiatan monitoring penyakit ikan dimaksudkan untuk mengantisipasi terjadinya wabah di kawasan perikanan budidaya yang berpotensi mengancam pencapaian target produksi dan menghambat kelancaran perdagangan produk perikanan budidaya di dunia internasional. Pada tahun sebelumnya, kegiatan ini dilaksanakan di 34 Provinsi dengan

dukungan anggaran Tugas Pembantuan namun pada Tahun 2025, kegiatan ini didelegasikan di BPKIL Serang dengan target sampel monitoring ikan air payau sebanyak 210 sampel. Capaian IKK tersebut, hasil pengukurannya baru diketahui akhir tahun.

Tabel 20. Capaian IKU Sampel Monitoring Penyakit Ikan Air Payau yang Diuji

Nama SS : Terkelolanya Sistem Perikanan Budi Daya Ikan Air Payau						
Nama Indikator : Sampel Monitoring Penyakit Ikan Air Payau yang Diuji						
TW II 2025			Realisasi TW II 2024	Perbandingan Realisasi TW II 2025 Thdp TW II 2024 (%)	Target 2025	Realisasi Terhadap Target Tahunan (%)
Target	Realisasi	Capaian (%)				
			-	-	210	

Pada indikator kinerja ini tidak bisa dibandingkan dengan tahun lalu karena indikator kinerja ini merupakan kegiatan baru. Perhitungan capaian untuk indikator kinerja ini belum bisa dilaksanakan dikarenakan perhitungan dilakukan pada akhir tahun. Rencana aksi pada periode yang akan datang yaitu meningkatkan kinerja dan berkoordinasi dengan BPKIL Serang dalam rangka mencapai target yang telah ditetapkan.

IKU 11. Sampel Surveilans Resistensi Antimikroba (AMU/AMR) Ikan Air Payau

Indikator Kinerja ini merupakan jumlah sampel air pengujian AMR yang telah dilakukan pengujian atau pemeriksaan oleh laboratorium kesehatan ikan dan lingkungan lingkup UPT Air Payau. Jumlah sampel ikan yang dilakukan pengujian resistensi antimikroba oleh UPT untuk mengetahui tingkat resistensi mikroba akibat penggunaan antimikroba. Semakin kecil tingkat resistensi mikroba semakin baik pengendalian resistensi antimikrobanya.

Dalam rangka melaksanakan Keputusan Direktorat Jenderal Perikanan Budi Daya Nomor 89 Tahun 2024 tentang rencana surveilans resistensi antimikroba tahun 2024, yang

didalamnya memuat lokasi sampling, target sampel, target komoditas sampel, bakteri target dan sasaran antibiotik.

Kegiatan Surveilans Resistensi Antimikroba (AMU/AMR) ikan air payau dilaksanakan di 7 (tujuh) UPT – Ditjen Perikanan Budi Daya dengan target total tahunan yang ditetapkan sebanyak 151 sampel. Berikut capaian Indikator Kinerja “Sampel Surveilans Resistensi Antimikroba (AMU/AMR) Ikan Air Payau (Sampel)” Triwulan II Tahun 2025.

Tabel 21. Capaian Indikator Kinerja “Sampel Surveilans Resistensi Antimikroba (AMU/AMR) Ikan Air Payau (Sampel)” Triwulan II Tahun 2025

No	UPT DJPB	Target Tahunan	Realisasi Triwulan II	Persentase (%)
1	BPBAP Ujung Batee	14	11	78,57
2	BPKIL Serang	35	37	105,71
3	BBPBAP Jepara	27	17	62,96
4	BPBAP Situbondo	22	14	63,64
5	BLUPBB Karawang	23	17	73,91
6	BPBAP Takalar	15	13	86,67
7	BPIU2K Karangasem	15	10	66,67
Total		151	119	78,81

Berdasarkan tabel diatas, menunjukkan bahwa sampel yang telah diambil oleh 7 (tujuh) UPT DJPB bidan air payau telah terealisasi sebesar 78,81% atau 119 sampel dari target tahunan yang ditetapkan. Selanjutnya terkait dengan sampel yang telah diambil, maka sampel tersebut akan dilakukan identifikasi bakteri guna mendapatkan isolat bakteri target. Apabila hasil identifikasi bakteri ditemukan bakteri target, maka pengujian dilanjutkan ke pengujian AMR dengan menggunakan metode *Antimicrobial Sensitivity Test* (AST). Metode AST ini bertujuan untuk mengetahui bakteri target masuk ke dalam golongan **intermediate**, **sensitif** atau **resisten** terhadap antibiotik. Pagu anggaran kegiatan surveilans AMR di 7 (tujuh) UPT DJPB bidang air payau sebesar Rp 137.511.000 yang hingga Triwulan II terealisasi sebesar Rp 20.195.700 atau 14,69%.

Tabel 22. Capaian IKU Sampel Surveilans Resistensi Antimikroba (AMU/AMR) Ikan Air Payau

Nama SS : Terkelolanya Sistem Perikanan Budi Daya Ikan Air Payau						
Nama Indikator : Sampel Surveilans Resistensi Antimikroba (AMU/AMR) Ikan Air Payau						
TW II 2025			Realisasi TW II 2024	Perbandingan Realisasi TW II 2025 Thdp TW II 2024 (%)	Target 2025	Realisasi Terhadap Target Tahunan (%)
Target	Realisasi	Capaian (%)				
77	119	154,54	-	-	151	78,81

Pada indikator kinerja ini tidak bisa dibandingkan dengan tahun lalu karena pada periode Triwulan II tahun sebelumnya juga belum ada capaian atau target yang ditentukan. Berdasarkan Tabel 22 diatas dapat dilihat bahwa realisasi capaian sampai dengan akhir Juni diperoleh 119 atau mencapai 78,81 dari target Tahun 2025. Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat bahwa realisasi pada periode Triwulan II sudah melebihi target pada periode yang sama, jika dipresentasikan realisasi sebesar 154,54 % dari pada target yang ditentukan. Pada indikator kinerja ini tidak bisa dibandingkan dengan capaian tahun lalu.

IKU 12. Kebijakan Tata Kelola Bidang Budi Daya Ikan Air Payau

Indikator Kinerja Kebijakan Tata Kelola Bidang Budi Daya Ikan Air Payau merupakan kegiatan penyusunan Norma, Kriteria, Standar dan Prosedur (NSPK) bidang budi daya ikan air payau. Rekomendasi kebijakan ini sangat penting dalam sistem penyelenggaraan pemerintah dikarenakan untuk berkembangnya perikanan budi daya di Indonesia khususnya budi daya ikan air payau maka dibutuhkan suatu input sarana dan prasarana produksi yang memadai dalam rangka menunjang peningkatan produksi budi daya dalam hal ini adalah penyusunan NSPK untuk mendukung tata kelola bidang produksi dan usaha budidaya. Dalam pengertian singkatnya, norma adalah aturan atau ketentuan yang dipakai sebagai tatanan dalam penyelenggaraan pemerintah. Standar adalah acuan yang dipakai sebagai patokan dalam penyelenggaraan pemerintah.

Prosedur adalah metode atau tata cara untuk penyelenggaraan pemerintah, sedangkan Kriteria adalah ukuran yang dipakai menjadi dasar dalam penyelenggaraan. NSPK dapat mempertegas dan memperjelas mekanisme dan tata cara yang diperlukan untuk mencapai target dan sasaran pelaksanaan kegiatan yang sudah dirancang.

Pada tahun 2025 target indikator kinerja ini yaitu sebanyak 6 rekomendasi kebijakan. Tidak ada anggaran khusus untuk mendukung indikator kegiatan ini. Capaian indikator jumlah rekomendasi hasil pengawasan dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 23. Capain IKU Kebijakan Tata Kelola Bidang Budi Daya Ikan Air Payau

Nama SS : Terkelolanya Sistem Perikanan Budi Daya Ikan Air Payau						
Nama Indikator : Kebijakan Tata Kelola Bidang Budi Daya Ikan Air Payau						
TW II 2025			Realisasi TW II 2024	Perbandingan Realisasi TW II 2025 Thdp TW II 2024 (%)	Target 2024	Realisasi Terhadap Target Tahunan (%)
Target	Realisasi	Capaian (%)				
-	-	-	-	-	3	-

Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat bahwa target yang ditetapkan tahun 2025 untuk indikator kinerja ini adalah 3 rekomendasi kebijakan. Pada indikator kinerja ini tidak bisa dibandingkan dengan tahun lalu karena pada periode Triwulan II tahun sebelumnya juga belum ada capaian atau target yang ditentukan. Perhitungan capaian untuk indikator kinerja ini belum bisa dilaksanakan dikarenakan perhitungan dilakukan pada akhir tahun atau sistem perhitungan tahunan. Rencana aksi pada periode yang akan datang yaitu meningkatkan kinerja dalam rangka mencapai target yang telah ditetapkan.

3.2.2. Sasaran Kegiatan (SK-2) : Terwujudnya Layanan Dukungan Manajemen yang Baik Lingkup Dit. Ikan Air Payau

IKU 13. Nilai PM SAKIP Satker Direktorat Ikan Air Payau

Pencapaian outcomes dan upaya untuk mendapatkan hasil yang lebih baik. Usaha-usaha penguatan akuntabilitas kinerja dan sekaligus peningkatannya, dilakukan antara lain melalui Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP).

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan melalui sistem pertanggungjawaban secara periodik.

Evaluasi SAKIP ini pada dasarnya dilakukan dengan tujuan: (i) Mengidentifikasi berbagai kelemahan dalam penerapan sistem akuntabilitas kinerja, di lingkungan instansi pemerintah (SAKIP); (ii) Memberikan saran perbaikan atau rekomendasi untuk peningkatan kinerja dan penguatan akuntabilitas instansi pemerintah; dan (iii) Menyusun peneringkatan hasil evaluasi guna kepentingan penetapan kebijakan di bidang pendayagunaan aparatur negara. Evaluasi dan penilaian SAKIP dilakukan atas komponen-komponen SAKIP sesuai dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Pada kedua peraturan tersebut disebutkan bahwa komponen SAKIP terdiri dari rencana strategis, perjanjian kinerja, pengukuran kinerja, pengelolaan data kinerja, pelaporan kinerja, dan reviu dan evaluasi kinerja. Sedangkan pada tingkat eselon I KKP, penilaian terhadap SAKIP dilakukan oleh Itjen KKP.

Tabel 24. Capaian IKU Nilai PM SAKIP Satker Direktorat Ikan Air Payau

Nama SS : Terwujudnya Layanan Dukungan Manajemen yang Baik Lingkup Direktorat Ikan Air Payau						
Nama Indikator : Nilai PM SAKIP Satker Direktorat Ikan Air Payau						
TW II 2025			Realisasi TW II 2024	Perbandingan Realisasi TW II 2025 Thdp TW II 2024 (%)	Target 2025	Realisasi Terhadap Target Tahunan (%)
Target	Realisasi	Capaian (%)				
-	-	-	-	-	84	-

Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat bahwa target nilai yang ditetapkan tahun 2025 untuk indikator kinerja ini adalah 84. Pada indikator kinerja manajerial ini tidak bisa dibandingkan dengan tahun lalu karena pada periode Triwulan II tahun sebelumnya juga belum ada capaian atau target yang ditentukan. Perhitungan capaian untuk indikator kinerja ini belum bisa dilaksanakan dikarenakan perhitungan dilakukan pada akhir tahun atau sistem perhitungan tahunan. Rencana aksi pada periode yang akan datang yaitu meningkatkan kinerja dalam hal pemenuhan dokumen SAKIP dan data dukung untuk mencapai target nilai yang telah di tentukan.

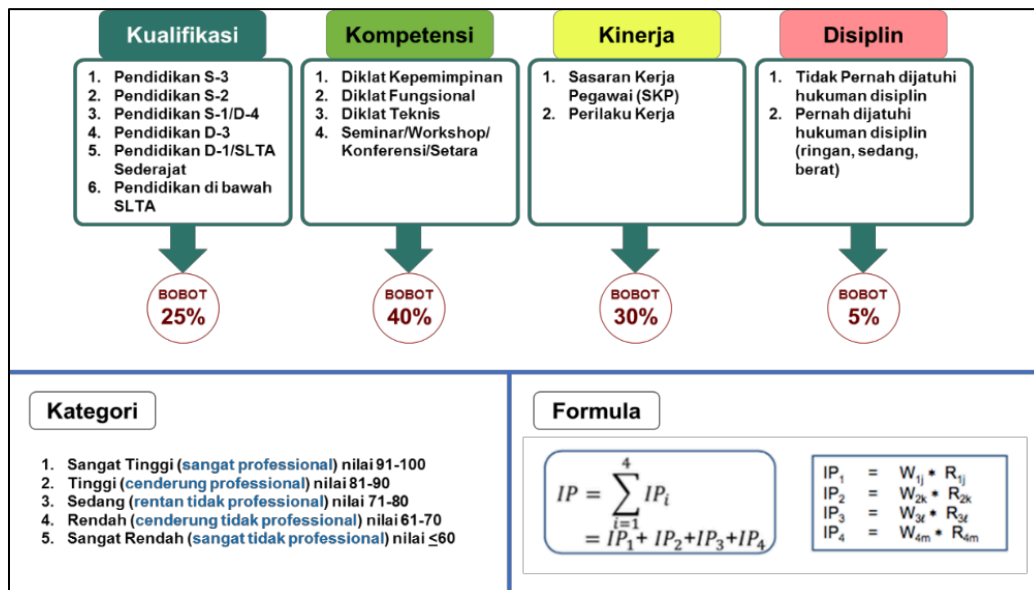
IKU 14. Indeks Profesionalitas ASN Satker Direktorat Ikan Air Payau

Indikator kinerja ini adalah suatu instrument yang digunakan untuk mengukur secara kuantitatif tingkat profesionalitas ASN yang hasilnya digunakan untuk penilaian dan evaluasi guna pengembangan profesionalitas profesi ASN. Indeks profesionalitas ASN diukur menggunakan standar profesionalitas ASN. Standar professional ASN terdiri dari empat dimensi, yaitu:

1. Kualifikasi, merupakan dimensi yang menggambarkan tingkat atau jenjang pendidikan yang dicapai seseorang untuk memperoleh suatu pengetahuan dan/atau keahlian khusus, sehingga seseorang tersebut mengetahui, memahami dan dapat menjalankan pekerjaan tertentu sesuai tugas jabatannya. Alat ukur yang digunakan adalah persentase berdasarkan jenjang riwayat pendidikan terakhir yang dicapai oleh PNS;
2. Kompetensi, merupakan dimensi yang menggambarkan kemampuan seseorang yang merupakan kombinasi antara pengetahuan, keterampilan dan sikap serta didukung dengan program pengembangan kompetensi berkesinambungan yang tercermin melalui perilaku kinerja, yang dapat diamati, diukur dan dievaluasi. Alat ukur yang digunakan adalah persentase berdasarkan jenis diklat yang pernah diikuti (seperti Diklat Kepemimpinan, Diklat Fungsional, Diklat Teknis, Kursus-kursus, dan Seminar/Workshop/Magang/sejenis;
3. Kinerja, merupakan dimensi yang menggambarkan pencapaian sasaran kerja pegawai yang didasarkan perencanaan kinerja pada tingkat individu dan tingkat unit kerja atau organisasi dengan memperhatikan target, capaian, hasil dan

manfaat yang dicapai serta perilaku PNS. Alat ukur yang digunakan adalah rata-rata kinerja individu pada suatu unit kerja;

4. Disiplin, merupakan dimensi yang menggambarkan kesanggupan seorang pegawai untuk mentaati kewajiban dan menghindari larangan yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan, peraturan kedisiplinan apabila tidak ditaati atau melanggar dijatuhi hukuman disiplin langsung maupun tidak langsung berpengaruh terhadap pelaksanaan tugas jabatan. Alat ukur yang digunakan persentase jumlah PNS yang memperoleh hukuman disiplin berdasarkan tingkatan hukuman disiplin.



Gambar 7. Matrik Perhitungan Indeks profesionalitas ASN

Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) melakukan upaya dalam hal pencapaian Indeks Profesionalitas dengan cara memberikan kesempatan ASN untuk meningkatkan kompetensinya sesuai dengan kebutuhan organisasi melalui: tugas belajar, izin belajar, Diklat, seminar/workshop/magang, dan sejenisnya. Selain itu didukung pula dengan capaian kinerja individu melalui penilaian prestasi kerja PNS dan pembinaan terhadap setiap PNS agar menjalankan tugasnya sesuai dengan kode etik.

Pada tahun 2025 target IKU IP ASN sebesar 81. Tidak ada anggaran khusus untuk mendukung indikator kegiatan ini. Capaian indikator kinerja IP ASN lingkup Direktorat Ikan Air Payau dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

**REKAPITULASI NILAI INDEKS PROFESIONALITAS ASN
LINGKUP DIREKTORAT JENDERAL PERIKANAN BUDI
DAYA PER TANGGAL 7 JULI 2025**

No.	Unit Kerja	Komponen IP ASN				Total	Kategori
		Kualifikasi	Kompetensi	Kinerja	Disiplin		
1.	Sekretariat DJPB	22,02	24,30	25,25	5,00	76,57	Sedang
2.	Dit Ikan Air Tawar	24,03	23,45	25,83	5,00	78,31	Sedang
3.	Dit Ikan Air Payau	22,63	24,93	25,66	5,00	78,22	Sedang
4.	Dit Ikan Air Laut	23,33	23,87	25,69	5,00	77,90	Sedang
5.	Dit Rumput Laut	23,44	26,69	25,78	5,00	80,91	Sedang
6.	Dit Prasarana dan Sarana	22,88	24,61	25,30	5,00	77,80	Sedang

Tabel 25. Capaian IKU Indeks Profesionalitas ASN Satker Direktorat Ikan Air Payau

Nama SS : Terwujudnya Layanan Dukungan Manajemen yang Baik Lingkup Direktorat Ikan Air Payau						
Nama Indikator : Indeks Profesionalitas ASN Satker Direktorat Ikan Air Payau						
TW II 2025			Realisasi TW II 2024	Perbandingan Realisasi TW II 2025 Thdp TW II 2024 (%)	Target 2025	Realisasi Terhadap Target Tahunan (%)
Target	Realisasi	Capaian (%)				
74	78,22	105,70	76,23	102,61	81	96,57

Pada tabel diatas dapat dilihat bahwa realisasi indikator kegiatan ini diukur setiap semester. Nilai yang dicapai sampai akhir semester atau Triwulan II tahun 2025 sebesar 78,22 atau 96,57% dari target yang ditetapkan di Triwulan II. Jika dibandingkan dengan periode sebelumnya dapat dilihat bahwa terdapat peningkatan nilai capaian persentase yaitu 105,70 % dan sudah melebihi target yang ditetapkan di Triwulan II. Rencana aksi untuk triwulan selanjutnya adalah terinformasinya/membantu menginput data dukung IP ASN ke pegawai lingkup Dit. Ikan Air Payau berupa sertifikat seminar/workshop, diklat/pelatihan teknis sesuai dengan tugas dan fungsi jabatan dan hasil kerja pegawai di SiASN BKN

IKU 15. Persentase Penyelesaian Temuan BPK Lingkup Direktorat Ikan Air Payau

Secara umum indikator kinerja ini dapat diartikan sebagai bentuk penyelesaian atau penilaian akhir terhadap hasil temuan pemeriksaan oleh BPK terhadap satu periode kinerja pemerintahan. Nilai temuan tersebut didasarkan atas laporan keuangan yang ditampilkan dalam Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK yang merupakan pernyataan professional pemeriksa mengenai kewajaran informasi keuangan yang dilaporkan dalam laporan keuangan yang didasarkan pada empat kriteria yakni kesesuaian dengan standar akuntansi pemerintahan, kecukupan pengungkapan, kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, dan efektivitas sistem pengendalian intern. Suatu kewajiban bagi instansi terkait untuk menindaklanjuti setiap temuan berdasarkan hasil pemeriksaan dari BPK. Hasil tindak lanjut tersebut dilakukan agar pengelolaan keuangan setiap instansi sesuai dengan sistem pengendalian intern dan peraturan perundang-undangan. Berikut di bawah ini tabel capaian persentase penyelesaian LHP BPK oleh satker Direktorat Ikan Air Payau du Triwulan II.

Tabel 26. Capaian IKU Persentase Penyelesaian Temuan BPK Lingkup Direktorat Ikan Air Payau

Nama SS : Terwujudnya Layanan Dukungan Manajemen yang Baik Lingkup Direktorat Ikan Air Payau						
Nama Indikator : Persentase Penyelesaian Temuan BPK Lingkup Direktorat Ikan Air Payau						
TW II 2025			Realisasi TW II 2024	Perbandingan Realisasi TW II 2025 Thdp TW II 2025 (%)	Target 2025	Realisasi Terhadap Target Tahunan (%)
Target	Realisasi	Capaian (%)				
-	-	-	-	-	100	-

Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat bahwa target yang ditetapkan tahun 2025 untuk indikator kinerja ini adalah sebesar 100%. Pada indikator kinerja manajerial ini tidak bisa dibandingkan dengan capaian tahun lalu karena pada tahun lalu indikator kinerja ini tidak dimunculkan. Perhitungan capaian untuk indikator kinerja ini belum bisa

dilaksanakan dikarenakan perhitungan dilakukan pada akhir tahun atau sistem perhitungan tahunan. Rencana aksi pada periode yang akan datang yaitu meningkatkan kinerja dalam rangka mencapai target yang telah ditetapkan.

IKU 16. Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja Satker Direktorat Ikan Air Payau

Persentase jumlah rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja lingkup Ditjen Perikanan Budi Daya adalah jumlah rekomendasi hasil pengawasan Inspektorat Jenderal kepada Direktorat Jenderal Perikanan Budi Daya berdasarkan LHP (terbatas pada LHP Audit, Reviu dan Evaluasi baik bentuk surat maupun bab) yang terbit dan telah ditindaklanjuti (berstatus proses dan/atau tuntas) oleh Direktorat Ikan Air Payau yang menjadi objek pengawasan. Cara penghitungannya adalah jumlah rekomendasi dari LHP Inspektorat Jenderal KKP yang telah ditindaklanjuti oleh Direktorat Ikan Air Payau dibagi jumlah rekomendasi dari LHP Inspektorat Jenderal KKP yang diberikan kepada Direktorat Produksi dan Usaha Budi Daya.

Pada tahun 2025 target IKU persentase jumlah rekomendasi hasil pengawasan sebesar 85. Tidak ada anggaran khusus untuk mendukung indikator kegiatan ini. Capaian indikator jumlah rekomendasi hasil pengawasan dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 27. Capaian IKU Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja Satker Direktorat Ikan Air Payau

Nama SS : Terwujudnya Layanan Dukungan Manajemen yang Baik Lingkup Direktorat Ikan Air Payau						
Nama Indikator : Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja Satker Direktorat Ikan Air Payau						
TW II 2025			Realisasi TW II 2024	Perbandingan Realisasi TW II 2025 Thdp TW II 2024 (%)	Target 2025	Realisasi Terhadap Target Tahunan (%)
Target	Realisasi	Capaian (%)				
85	100	117,65	100	100	85	117,65

Berdasarkan tabel 27 diatas dapat dilihat bahwa target yang ditetapkan tahun 2025 untuk indikator kinerja ini adalah 85, Realisasi yang di peroleh adalah 100 dengan capaian nilai pada Triwulan II tahun 2025 sebanyak 117,65 %. Pada indikator kinerja manajerial ini jika dibandingkan dengan capaian tahun 2024 pada periode yang sama persentasenya sebesar 100 %. Rencana aksi pada periode yang akan datang yaitu meningkatkan kinerja dalam rangka mencapai target yang telah ditetapkan.

**Data Capaian IKU "Persentase Jumlah Rekomendasi Hasil
Pengawasan yang Dimanfaatkan Untuk Perbaikan Kinerja Lingkup KKP"
Triwulan II Tahun 2025**

No	Unit Kerja	Capaian IKU
1	Setdiljen Perikanan Budi Daya	93,44%
2	Direktorat lkan Air Laut	87,50%
3	Direktorat Rumput Laut	89,19%
4	Direktorat lkan Air Tawar	94,12%
5	Direktorat lkan Air Payau	100,00%
6	Direktorat Prasarana dan Sarana	94,12%
7	BBPBAP Jepara	100,00%
8	BBPBL Lampung	94,12%
9	BBPBAT Sukabumi	94,12%
10	BPBAP Situbondo	100,00%
11	BPBAP Takalar	94,12%
12	BPBAT Sungai Gelam	94,12%
13	BPBAT Mandiangin	94,12%
14	BPBL Batam	100,00%
15	BPBL Lombok	94,12%
16	BPBL Ambon	94,12%
17	BPBAP Ujung Batee	94,12%
18	BPBAT Tatelu	96,00%
19	BLUPPB Karawang	86,67%
20	BPIUUK Karangasem	100,00%
21	BPKIL Serang	94,12%

IKU 17. Persentase Layanan Perkantoran Direktorat Ikan Air Payau

Layanan Perkantoran adalah merupakan kegiatan layanan yang lebih bersifat pada pelayanan internal layanan keperluan sehari-hari perkantoran. Indikator ini menjadi pendukung untuk mencapai kegiatan manajemen internal Dit. Ikan Air Payau berupa Kehadiran Pegawai, Pengelolaan SDM Aparatur, Persuratan, Kerumahtanggan dan Pengelolaan Keuangan. kearsipan, operasional dan pemerliharaan kantor. Pada tahun 2025 target indikator kinerja ini yaitu 80 persen. Berikut adalah Rekapitulasi Kehadiran Pegawai dan Rekap Persuratan pada Direktorat Ikan Air Payau Triwulan II Tahun 2025

Tabel 28. Rekapitulasi Kehadiran Pegawai Direktorat Ikan Air Payau Triwulan II Tahun 2025

No	Unit Kerja	Jumlah Pegawai	Target Kehadiran	Kehadiran			persentase Kehadiran (%)
				Kehadiran Kantor	Dinas Luar	Jumlah	
1	Timja Kawasan Budi Daya Ikan Air Payau	9	459	339	74	413	89,97
2	Timja Induk dan Benih	7	357	277	8	285	79,83
3	Timja Pakan Ikan	6	324	279	45	306	94,44
4	Timja Produksi	7	357	224	123	347	97,19
5	Timja Kesehatan Ikan	7	357	328	19	347	97,19
6	Timja Dukungan Manajemen	10	510	419	36	455	89,21
Jumlah		47	2346	1866	305	2356	91,29

Tabel 29. Rekap Persuratan pada Direktorat Ikan Air Payau Triwulan II Tahun 2025

No	Jenis/Surat Dokumen	Jumlah	Keterangan
A. Surat Masuk			
1	Surat Masuk	456	Lingkup KKP, Dinas, Swasta
2	Undangan Masuk	339	Lingkup KKP, Dinas, Swasta
	Jumlah A	795	
B. Surat Keluar			
1	Surat Dinas Keluar	61	Lingkup KKP, Dinas, Swasta
2	Memo Keluar	34	Lingkup Ditjen PB
3	Surat Undangan	30	Lingkup KKP, Dinas, Swasta
	Jumlah B	125	
	Total	920	

Tabel 30. Capaian IKU Persentase Layanan Perkantoran Direktorat Ikan Air Payau

Nama SS : Terwujudnya Layanan Dukungan Manajemen yang Baik Lingkup Direktorat Ikan Air Payau						
Nama Indikator : Persentase Layanan Perkantoran Direktorat Ikan Air Payau						
TW II 2025			Realisasi TW II 2024	Perbandingan Realisasi TW III 2025 Thdp TW II 2024 (%)	Target 2025	Realisasi Terhadap Target Tahunan (%)
Target	Realisasi	Capaian (%)				
80	98,26	122,83	20,39	122,83	80	122,83

Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat bahwa target yang ditetapkan tahun 2025 untuk indikator kinerja ini adalah sebesar 80%. Perhitungan capaian indikator kinerja ini berasal dari aspek kehadiran pegawai, pengelolaan SDM aparatur, persuratan dan kerumah tanggaan dan pelaporan keuangan dan Berdasarkan hasil perhitungan rumus diperoleh capaian Realisasi TW II pada indikator kegiatan Layanan Perkantoran adalah 98,26 dengan capaian nilai pada Triwulan II tahun 2025 sebanyak 122,83%.

IKU 18. Nilai Pengawasan Kearsipan Internal Satker Direktorat Ikan Air Payau

Arsip yang tercipta dari kegiatan lembaga negara dan kegiatan yang menggunakan sumber dana negara merupakan memori, acuan, dan bahan pertanggungjawaban dalam penyelenggaraan pemerintahan negara sehingga perlu dilakukan usaha penyelamatan secara terpadu, sistemik, dan komprehensif dengan mengukur tingkat pencipta arsip dalam menyelenggarakan kearsipan sesuai dengan prinsip, kaidah, standar kearsipan, dan peraturan perundang-undangan. Nilai pengawasan kearsipan internal adalah penilaian yang dilakukan untuk menilai seberapa baik pencipta arsip dalam menjalankan penyelenggaraan kearsipan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Audit kearsipan internal dilakukan oleh tim pengawas kearsipan internal untuk menilai pengelolaan arsip dinamis di lingkungan pencipta arsip yang memuat kondisi faktual, pemenuhan standar, rekomendasi, dan nilai pengawasan.

Adapun Dasar hukum pengawasan kearsipan KKP adalah Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Kearsipan di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan. Berikut ini tabel capaian realisasi indikator kinerja pada periode Triwulan II tahun 2025:

Tabel 31. Capaian IKU Nilai Pengawasan Kearsipan Internal Satker Direktorat Ikan Air Payau

Nama SS : Terwujudnya Layanan Dukungan Manajemen yang Baik Lingkup Direktorat Ikan Air Payau						
Nama Indikator : Nilai Pengawasan Kearsipan Internal Satker Direktorat Ikan Air Payau						
TW II 2025			Realisasi TW II 2024	Perbandingan Realisasi TW II 2025 Thdp TW II 2024 (%)	Target 2025	Realisasi Terhadap Target Tahunan (%)
Target	Realisasi	Capaian (%)				
-	-	-	-	-	70	-

Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat bahwa target yang ditetapkan tahun 2025 untuk IK ini adalah sebesar 70. Pada indikator kinerja manajerial ini tidak bisa dibandingkan dengan capaian tahun lalu. Perhitungan capaian untuk indikator kinerja ini belum bisa dilaksanakan dikarenakan perhitungan dilakukan pada akhir tahun atau sistem perhitungan tahunan. Rencana aksi pada periode yang akan datang yaitu meningkatkan kinerja kearsipan dalam rangka mencapai target yang telah ditetapkan.

IKU 19. Persentase Penyelesaian SOP Satker Direktorat Ikan Air Payau

Proses Bisnis (Probis) adalah kumpulan aktivitas terstruktur yang menggambarkan hubungan kerja yang efektif dan efisien antarunit organisasi untuk menghasilkan kinerja dan keluaran yang bernilai tambah sesuai dengan tujuan pendirian organisasi. Standar Operasional Prosedur (SOP) adalah serangkaian instruksi tertulis yang dibakukan mengenai proses penyelenggaraan aktivitas organisasi, bagaimana dan kapan harus dilakukan, dimana, dan oleh siapa dilakukan. Probis KKP terdiri atas: Probis

Level 0, Probis Level 1, Probis Level 2, dan Probis Level 3. Penyusunan SOP berdasarkan Probis Level 3. Indikator ini mengukur capaian kinerja unit organisasi dalam penyelesaian SOP, tidak termasuk Probis Level 0, Level 1, Level 2 dan Level 3. Probis Level 0 dan Level 1 KKP akan ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan, sedangkan untuk Probis Level 2 dan Level 3 masing-masing unit organisasi ditetapkan dengan Keputusan Jabatan Pimpinan Tinggi Madya. Berikut ini tabel capaian realisasi indikator kinerja pada periode Triwulan II tahun 2025:

Tabel 32. Capaian IKU Persentase Penyelesaian SOP Satker Direktorat Ikan Air Payau

Nama SS : Terwujudnya Layanan Dukungan Manajemen yang Baik Lingkup Direktorat Ikan Air Payau						
Nama Indikator : Persentase Penyelesaian SOP Satker Direktorat Ikan Air Payau						
TW II 2025			Realisasi TW II 2024	Perbandingan Realisasi TW II 2025 Thdp TW II 2024 (%)	Target 2025	Realisasi Terhadap Target Tahunan (%)
Target	Realisasi	Capaian (%)				
-	-	-	-	-	65	-

Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat bahwa target yang ditetapkan tahun 2025 untuk indikator kinerja ini adalah sebesar 65. Pada indikator kinerja manajerial ini tidak bisa dibandingkan dengan capaian tahun lalu. Perhitungan capaian untuk indikator kinerja ini belum bisa dilaksanakan dikarenakan perhitungan dilakukan pada akhir tahun atau sistem perhitungan tahunan. Rencana aksi pada periode yang akan datang yaitu meningkatkan kinerja dalam rangka mencapai target yang telah ditetapkan.

BAB IV. PENUTUP

Direktorat Ikan Air Payau merupakan salah satu unit kerja Eselon II di lingkup Direktorat Jenderal Perikanan Budi Daya, Kementerian Kelautandan Perikanan Republik Indonesia, memiliki tugas dan fungsi untuk melakukan perumusan kebijakan dan koordinasi pelaksanaan kebijakan bidang perikanan budi daya. Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Direktorat Ikan Air Payau berlandaskan kepada tujuan, sasaran dan program kerja yang telah diterapkan dalam Renstra KKP, Renstra DJPB dan kontrak kinerja antara Direktur Jenderal Perikanan Budi Daya dengan Direktur dan/atau Pelaksana Tugas Direktur Ikan Air Payau.

Laporan Kinerja (LKj) Direktorat Ikan Air Payau periode Triwulan II tahun 2025 telah menyajikan capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) yang diperoleh selama periode Triwulan II tahun 2025. Terhadap capaian IKU tersebut dilakukan analisis dan evaluasi serta perbandingan terhadap capaian IKU dengan periode yang sama pada tahun sebelumnya.

Berdasarkan uraian pencapaian kinerja dalam Bab III, dari hasil analisis terhadap capaian kinerja Direktorat Ikan Air Payau sampai akhir periode Triwulan II tahun 2025 dari total 19 (sembilan belas) indikator kinerja pendukung sasaran strategis, sejumlah 10 (sepuluh) indikator kinerja memenuhi target yang telah ditetapkan. Hal yang perlu diperhatikan untuk mencapai target yang telah ditentukan yaitu mengintensifkan koordinasi dengan UPT khususnya yang pada bidang budi daya ikan air payau lingkup Direktorat Jenderal Perikanan Budi Daya.